

336.22
RAH
u e



KETAATAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
DI KABUPATEN SEMARANG

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

NELLY RAHMAWATI, SH
B4A. 099122

PEMBIMBING :

1. Prof. DR. H. Miyasto, SU
2. Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH

PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003

KETAATAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
DI KABUPATEN SEMARANG

Disusun oleh :

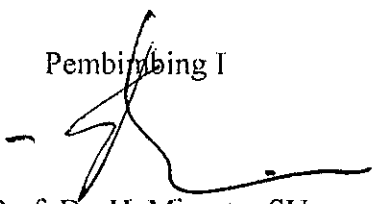
NELLY RAHMAWATI, SH
B4A. 099122

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

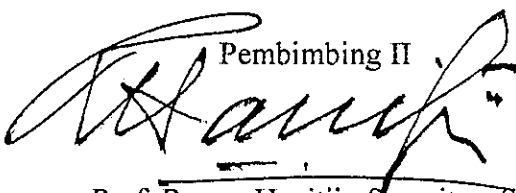
Pada tanggal :

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan untuk
memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Miyasto, SU
NIP. 130.516.585

Pembimbing II


Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH.
NIP. 130.350.517

Mengetahui Ketua Program

Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.
NIP. 130.250.519

MOTTO

“Jangan tanya apa yang negara berikan kepadamu tetapi bertanyalah apa yang kau berikan kepada negara (Kennedy)”

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft.	2085/T/MH/e
Tgl.	29 sept'03

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan tesis yang berjudul :
“KETAATAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KABUPATEN SEMARANG” ini dapat terselesaikan.

Tesis ini dalam penyusunannya banyak hambatan yang dihadapi penulis diantaranya keterbatasan sumber data yang diperoleh. Namun demikian banyak pihak pula yang dengan sukarela membantu penulis dalam memberikan data, menyediakan informasi dan dokumen yang dibutuhkan, memberikan masukan pemikiran dan ide-ide dalam proses penyusunan tesis ini.

Secara teoritis, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pemikiran terhadap sistem hukum di bidang perpajakan, secara praktis sebagai masukan bagi pemerintah untuk menyempurnakan pola dan mekanisme penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di masa-masa mendatang.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. BARDA NAWAWI ARIEF, SH selaku Ketua Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah banyak membantu dalam memberikan kemudahan-kemudahan selama penyusunan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. MIYASTO, SU, selaku Pembimbing I dalam penulisan tesis ini, yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Prof. RONNY HANITJO SOEMITRO SH, selaku Pembimbing II dalam penulisan tesis ini, yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
4. Seluruh Civitas Akademika Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah membantu penulis untuk membuka cakrawala ilmu yang lebih luas selama penulis menjadi mahasiswa.
5. Rekan-rekan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Angkatan I Paralel Kajian Hukum, Ekonomi dan Teknologi yang selama ini telah menjadi pasangan diskusi yang intensif.
6. Semua pihak yang telah membantu penelitian dan penulisan tesis ini yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu per satu, kepada Tuhanlah tempat aku menyerahkan segalanya.

Dengan penuh kesadaran, penulis memahami bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna dan mempunyai wawasan yang terbatas, oleh karenanya setiap masukan yang membawa karya ilmiah ini lebih baik akan penulis terima dengan senang hati.

Semarang, 25 Februari 2003

Penulis

NELLY RAHMAWATI, SH
B4A. 099122

ABSTRAK

Pajak dan pembangunan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keterkaitan diantara keduanya dapat dilihat dalam sekuensi sebagai berikut : pembangunan merupakan proses yang harus didukung dengan tersedianya dana, sementara itu, pajak-pajak merupakan instrumen yang dipergunakan untuk mengumpulkan uang yang dapat dipergunakan sebagai instrumen untuk memasukan uang (sebanyak-banyaknya) ke dalam Kas Negara sering disebut sebagai fungsi budgeter. Namun demikian, keterkaitan antara pajak dan pembangunan tidak hanya dapat dilihat dalam formula tersebut, sebab pajak dapat pula dipergunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan negara. Fungsi yang demikian disebut sebagai fungsi reguler.

Mengingat pelaksanaan otonomi daerah disandarkan pada pendapatan asli daerah yang antara lain dari pembagian persentasi Pajak Bumi dan Bangunan dengan formulasi pembagian 90 % untuk Pemerintah Daerah dan 10 % untuk Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (3) UU No. 12 tahun 1985 jo UU No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan PP No. 47 tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah mempunyai kepentingan terhadap keberhasilan pemungutan PBB.

Hasil pemungutan PBB akan dapat dipergunakan untuk menopang kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Keberhasilan pemungutan pajak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban hutang pajaknya. Berpijak dari pemikiran tersebut, maka penelitian difokuskan pada ketaatan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Semarang.

Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif sekaligus yuridis sosiologis. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat melakukan pendekatan permasalahan baik secara yuridis normatif maupun sosiologis. Sedang analisa yang digunakan ialah analisa domain (kewilayahan dan taksonomi).

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa wajib pajak PBB di Kabupaten Semarang sangat taat (92,85 %). Berarti yang tidak taat hanya sebesar 7,15 %, sedang yang membayar terlambat 7,14 %. Dari hasil penelitian juga diketahui masih diperlukan sosialisasi serta pelaksanaan *self assessment*.

ABSTRACT

There was a very close correlation between tax and development. This correlation between them could be seen in many sequent below : development was a process which should be supported by fund available for it, meanwhile, taxes were instruments which used to collected money whereas it could be applied as instruments to put money (as much as possible) into Government Treasury called as budgetary function. However, correlation between tax and development couldn't just be seen in that formula, because taxes also could be used as instruments to achieved many goals outside the government finances frame. Those called as regular function.

It was considered that performed of regional otonomy lean on regional original income which a part comes from the distribution of Land and Building Tax, which formulated as followed : 90 % for Regional Government and 10 % for Central Government. They regulated in chapter 18 paragraph (3) of Act No. 12/1985 jo Act No. 12/ 1994 of Land and Building Tax, dan Government Regulation No. 47/1985 of Income Distribution of Land and Building Tax between Central and Regional Government, therefore Regional Government have an importance towards the succesful of Land and Building Tax collection.

Collection income of Land and Building Tax could be used to support development activity carrying out by Regional Government. The succesful of tax collection couldn't be separated from influence of tax-payer obedience in their obligation to pay taxes. Based on that consideration, therefore this research focussed on the obedience of tax-payer in pay Land and Building Tax (PBB) in Semarang Regent.

This research used normative juridical and also sociological juridical methods. This means to be able to approach the problems better from normative either from sociological juridical methods. While analysis done here was domain analysis (regional and taxation).

The research results concluded that PBB tax-payer in Semarang Regent were obedient (92,85%). It means that PBB tax-payer that weren't obedient amount of 71,5%, while the one who late to pay was 7,14%. From research also known that it still needed to socialize and carried out of self assesment.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Kegunaan Penelitian	12
1.5 Metode Penelitian	13
1.6 Kerangka Teoritik	25
1.7 Sistematika Penulisan Tesis.....	27
BAB II : TELAAH PUSTAKA	
2.1 Terminologi Pendekatan Yuridis Normatif	31
2.2 Terminologi Pendekatan Sosiologi	39

2.3	Sistem Pemugutan Pajak	51
2.4	Sanksi Pidana	57
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS		
3.1	Sistem Pemungutan PBB	60
3.2	Analisa Normatif	65
3.3	Ketaatan Wajib Pajak PBB	80
3.4	Analisis Data	98
BAB IV : PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	117
4.2	Saran	118
DAFTAR PUSTAKA		122

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL I.1 : Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang	8
TABEL I.2 : Jumlah Nominal Hasil Pengutan PBB Kabupaten Semarang	9
TABEL III.1 : Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	82
TABEL III.2 : Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Yang Taat	82
TABEL III.3 : Pajak Bumi dan Bangunan Tepat Waktu	83
TABEL III.4 : Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Lebih Awal	84
TABEL III.5 : Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Terlambat	85
TABEL III.6 : Pajak Bumi dan Bangunan Lebih Awal, Tepat, Kadang- Kadang Terlambat	85
TABEL III.7 : Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum Jatuh Tempo	86
TABEL III.8 : Sebab Petugas Penarik Datang Ke Rumah	86
TABEL III.9 : Sebab Murahnya Pajak Terhutang	87
TABEL III.10 : Pembayar PBB Sebelum Jatuh Tempo	88
TABEL III.11 : Takut Ada Sanksi Pidana	88
TABEL III.12 : Memang Suatu Kewajiban	89
TABEL III.13 : Alasan Wajib Pajak Tepat Waktu, Karena Penarik Datang Ke Rumah	89

TABEL III.14	: Pajak Terhutang Itu Murah	90
TABEL III.15	: Membayar PBB Karena Penting Bagi Negara	91
TABEL III.16	: Takut Ada Sanksi Pidana	91
TABEL III.17	: Sebab Terlambat Karena Lupa	92
TABEL III.18	: Tidak Sesuai Dengan Kewajiban Pajak	92
TABEL III.19	: Petugas Penarik Tidak Datang Ke Rumah	93
TABEL III.20	: Tidak Mencerminkan Keadilan	94
TABEL III.21	: Alasan Terlambat, Karena Yakin Sanksi Pidananya Tidak Akan Dilaksanakan	94
TABEL III.22	: Keterlibatan Masyarakat	95
TABEL III.23	: Pemahaman Masyarakat	96
TABEL III.24	: Pengajuan Permohonan	96
TABEL III.25	: Permohonan Dikabulkan	97
TABEL III.26	: Realisasi Penerimaan PBB dan BPHTB Tahun 1999/2000 Kantor Pelayanan PBB Ungaran	99
TABEL III.27	: Realisasi Penerimaan PBB Di Kelurahan Ungaran	100
TABEL III.28	: Realisasi Penerimaan PBB Di Kelurahan Sidomulyo	101
TABEL III.29	: Realisasi Penerimaan PBB Di Kelurahan Gedanganak	102
TABEL III.30	: Penerimaan PBB dan BPHTB Kabupaten Semarang	103
TABEL III.31	: Data Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Semarang	106
TABEL III.32	: Bobot Ketaatan Wajib Pajak	109
TABEL III.33	: Bobot Membayar PBB Tepat Waktu.....	110

TABEL III.34	: Bobot Membayar PBB Lebih Awal	110
TABEL III.35	: Bobot Pembayaran Pajak Sebelum Jatuh Tempo	111
TABEL III.36	: Bobot Pengajuan Permohonan	111
TABEL III.37	: Bobot Ketidak Sesuaian Dengan Kewajiban Pajak	112
TABEL III.38	: Bobot Tidak Mencerminkan Keadilan	112
TABEL III.39	: Bobot Membayar PBB Terlambat	113
TABEL III.40	: Bobot Sebab Terlambat Karena Lupa	113
TABEL III.41	: Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang	114
TABEL III.42	: Jumlah Nominal Hasil Pungutan PBB	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Skema Pemikiran	27
2. Skema Jalur Berkas Administrasi PBB dan Sistem Pemungutan	37
3. Skema Konstruksi Sikap Manusia	48
4. Skema Derajat Kepatuhan Wajib Pajak	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak dan pembangunan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keterkaitan diantara keduanya dapat dilihat dalam sekuensi sebagai berikut : pembangunan merupakan proses yang harus didukung dengan tersedianya dana, sementara itu, pajak merupakan instrumen yang dipergunakan untuk mengumpulkan uang yang dapat dipergunakan untuk menopang proses pembangunan. Fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai instrumen untuk memasukkan uang (sebanyak-banyaknya) ke dalam kas negara sering disebut sebagai fungsi budgeter. Namun demikian, keterkaitan antara pajak dan pembangunan tidak hanya dapat dilihat dalam formula tersebut, sebab pajak dapat pula dipergunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan negara. Fungsi yang demikian disebut sebagai fungsi reguler.

Sejarah pembangunan Indonesia diwarnai oleh perubahan sumber pendanaan secara signifikan pada tahun 1983. Beberapa ahli perpajakan Indonesia memandang bahwa tahun 1983 merupakan titik reformasi perpajakan (*tax reform*). Perubahan ini ditandai oleh kemauan politik pemerintah untuk mengalihkan sumber dana pembangunan yang sebelumnya ditumpukan pada

pendapatan dari sektor minyak dan gas bumi (migas) ke pendapatan dari sektor pajak¹. Kesadaran pemerintah apabila APBN ditumpukan pada pendapatan dari sektor migas dinilai cukup riskan bertitik tolak dari pengalaman bahwa harga migas sangat rentan terhadap fluktuasi harga ditingkat dunia. Prediksi yang demikian ternyata menjadi kenyataan pada tahun 1985–1986 dimana APBN disusun berdasarkan asumsi harga minyak bumi kurang lebih US \$ 22 per barrel ternyata jatuh sampai dibawah US \$ 10 per barrel. Keadaan ini mengakibatkan timbulnya kesulitan besar bagi bangsa Indonesia. Kemauan politik pemerintah ini diikuti dengan dilakukannya pembenahan terhadap kebijakan perpajakan yang meliputi pembenahan landasan yuridis, pembenahan institusi perpajakan dan pembenahan aparatur perpajakan. Pembaharuan terhadap landasan yuridis perpajakan ditandai dengan diberlakukannya UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) jis UU No. 9 tahun 1994, UU No. 16 tahun 2000, UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan UU No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). Pembaharuan landasan yuridis ini kemudian diikuti dengan pemberlakuan pajak atas bumi dan bangunan (PBB) melalui UU No. 12 tahun 1985.

Pergeseran kebijakan perpajakan yang dimulai pada tahun 1983 telah menampakkan hasil terutama apabila diukur dari rasio pemasukan sektor pajak

¹ Pidato Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1983 dalam Rochmat Soemitro, Pajak Penghasilan. Edisi Revisi, Eresco, Bandung, 1990, Hal. 1-7

terhadap APBN. Rasio pajak terhadap APBN yang pada awal dilakukan reformasi perpajakan (tahun 1983) sebesar 28,6 % telah meningkat menjadi 59,8 % pada tahun 2001². Dengan melihat perbandingan ini diperoleh data bahwa peran pajak terhadap penyediaan dana pembangunan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Ini merupakan suatu indikator bahwa kebijakan perpajakan yang dirancang oleh pemerintah pada awal reformasi perpajakan (*tax reform*)³ telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Miyasto memformulasikan alasan dilakukannya reformasi perpajakan sebagai berikut : “Reformasi perpajakan pertama (1983) terutama dilatarbelakangi oleh kesulitan dana pembangunan yang disebabkan oleh turunnya harga minyak dan gas bumi (migas) di pasar dunia. Sejak pertengahan tahun 1980 sampai dengan tahun 1990 harga minyak bumi di pasar dunia mengalami penurunan secara terus menerus dan sangat drastis. Turunnya harga migas ini menyebabkan pemerintah mulai melihat sumber-sumber penerimaan diluar migas, salah satu diantaranya adalah pajak. Sedang reformasi perpajakan kedua (1994) dilatarbelakangi oleh beberapa kecenderungan internal dan eksternal yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada dekade tahun 1990, yaitu semakin kuatnya keinginan untuk meningkatkan kemandirian dalam penerimaan negara dan daerah. Hal ini seiring dengan semakin meningkatnya hutang-hutang Indonesia

² Angka ini adalah estimasi menurut RAPBN pada tahun yang bersangkutan

³ Miyasto, Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya, FE UNDIP, Semarang, 1997, Hal. 7-17

dan tekanan-tekanan negara kreditur yang selalu mengkaitkan pinjaman luar negeri dengan isu-isu politik. Dalam kaitannya dengan hal yang demikian pajak sebagai sumber penerimaan negara yang relatif stabil akan merupakan tumpuan utama bagi penerimaan negara. Oleh sebab itu, tidak ada pilihan lain bagi pemerintah Indonesia posisi internalnya termasuk diantaranya pada strategi perpajakan yang mampu memperkuat posisi internal tersebut agar Indonesia mempunyai keunggulan-keunggulan strategis untuk bersaing.

Kebijakan penopangan dana pembangunan (termasuk juga didalamnya kebutuhan rutin) dengan mengandalkan pendapatan dari sektor pajak sampai saat ini baru terealisasi pada pemerintah pusat. Dalam suatu pemerintahan yang sifatnya desentralistik, kebijakan yang demikian ini seharusnya juga terjadi pada pemerintah daerah. Terlebih dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Penopangan sektor pajak terhadap kebutuhan dana pembangunan masih gagal pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Propinsi. Hal yang demikian terjadi oleh karena obyek-obyek pajak yang selama ini ada dan potensial untuk memberikan pemasukkan ke kas negara (baca : APBN) telah diambil oleh pemerintah pusat. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), dan cukai. Sejarah pengambilalihan sumber pajak oleh pemerintah pusat yang terakhir terjadi pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB menggantikan beberapa jenis pajak atas kepemilikan pada system perpajakan lama, antara lain Pajak Rumah Tangga 1908, Ordonansi Verponding

Indonesia 1923, Ordonansi Verponding tahun 1928, Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, dan Ordonansi Pajak Jalan 1942.

PBB merupakan pajak atas kekayaan (*tax property*) dengan cakupan objek bumi dan bangunan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sedang permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, galangan kapal (dermaga), taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak/air dan gas, pipa minyak, dan fasilitas lain yang merupakan iuran pembangunan daerah (Ipeda)⁴. Untuk yang terakhir ini termasuk dalam kelompok pajak daerah, dimana legitimasi untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dan pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah (pajak Pemerintah Kabupaten/Kota). Dengan demikian, PBB yang semula bernama Ipeda merupakan sumber penerimaan daerah untuk menopang pembangunan (termasuk pengeluaran rutin) Pemerintah Kabupaten/Kota⁵.

⁴ Tika Noorjaya, 1993 : 3

⁵ Pada Pasal 18 UU PBB, ditentukan bahwa hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan inbihangan pembagian sekurang-kurangnya 90 % untuk pemerintah daerah tingkat II dan pemerintah daerah tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan. Bagian penerimaan daerah tersebut sebagian besar diberikan kepada daerah tingkat II.

Pengambilalihan pajak daerah menjadi pajak pusat dapat dilihat sebagai bentuk kooptasi sumber penerimaan daerah oleh pemerintah pusat. Namun juga dapat dilihat sebagai langkah pembaharuan sistem perpajakan lama. Pada Pasal 18 UU PBB, ditentukan bahwa hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan negara dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan imbalan pembagian sekurang-kurangnya 90 % untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dan daerah propinsi sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan. Bagian penerimaan daerah tersebut sebagian besar diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Tika Noorjaya berpendapat bahwa pembaharuan PBB tidak hanya merupakan kewajaran tetapi adalah suatu keharusan, sehingga sistem perpajakan pada PBB dapat disesuaikan dengan jiwa, hakikat, harkat, dan martabat kita sebagai bangsa yang merdeka, kemandirian dalam tujuan pembangunan serta perkembangan teknologi. Dengan diambilalhnya pajak dengan obyek bumi dan bangunan menjadi pajak pusat, praktis PBB tidak dapat lagi dikonstruksikan sebagai sumber utama penerimaan daerah. Walaupun alokasi penerimaan PBB dibagi dengan formula sebagai berikut :

- a. untuk Pemerintah Pusat 10 %
- b. untuk upah pungut 9 %
- c. untuk Pemerintah Kabupaten/Kota 16,2 %
- d. untuk Pemerintah Propinsi 64,8 %

Dengan formula pembagian yang demikian, Pemerintah Kabupaten/Kota menerima bagian terbesar dari hasil pemungutan PBB. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sekalipun PBB telah ditarik menjadi pajak pusat sejak diberlakukannya UU No. 12 tahun 1985, Pemerintah Daerah tetaplah mempunyai kepentingan terhadap keberhasilan pemungutan PBB. Kepentingan Pemerintah Kabupaten/Kota bertitik tolak dari formula pembagian hasil pemungutan PBB itulah yang menjadi jalan masuk mengapa Pemerintah Kabupaten/Kota berupaya untuk “mensukseskan” pemungutan PBB melalui aparat vertikal yang ada di bawahnya.

Dalam ruang lingkup yang lebih kecil, Pemerintah Kabupaten Semarang memiliki kepentingan terhadap keberhasilan terhadap PBB. Bagian dana hasil pemungutan PBB ini akan dapat dipergunakan untuk menopang kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sebaliknya kegagalan terhadap pemungutan pajak di wilayah Pemerintah Kabupaten Semarang secara otomatis akan mengakibatkan bagian dana yang diharapkan tidak dapat terpenuhi.

Penerimaan Daerah Kabupaten Semarang terus diupayakan peningkatannya dengan menggali dan mengembangkan semua sumber terutama sumber penerimaan dari sektor perpajakan. Sistem dan prosedur perpajakan untuk meningkatkan pendapatan daerah terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat, dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan masyarakat.

Dalam sistem pajak keseluruhan, maka PBB diarahkan untuk memenuhi fungsi bugedter. Fungsi ini sangat penting, karena proporsi penerimaan pajak terhadap seluruh penerimaan pemerintah daerah dapat digunakan sebagai satu indikator stabilitas penerimaan dan kemandirian daerah dalam membiayai pengeluaran-pengeluarannya dalam menghadapi persiapan implementasi Otonomi Daerah Undang-undang No. 22 Tahun 1999.

Tabel di bawah ini dapat dijadikan bukti belum efektif atau optimalnya aparat perpajakan daerah didalam melaksanakan tugasnya.

Tabel I.1
Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Semarang
Tahun 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003

TAHUN	TARGET	REALISASI
1999/2000	11.304.489.000	12.069.291.809
2000/2001	9.017.352.000	11.002.410.729
2001/2002	17.042.497.500	18.344.817.318
2002/2003	29.212.284.000	20.289.828.707

Dalam Tabel I.1 diragakan data realisasi pendapatan asli daerah yang rata-rata lebih besar dari target yang ditetapkan. Hanya pada Tahun berjalan 2002/2003 realisasi Pendapatan Asli Daerah baru mencapai 20.289.828.707. Sedang jumlah nominal hasil pungutan PBB Kabupaten Semarang dari Tahun 1999 sampai 2002 tersaji dalam data dibawah ini.

Tabel I.2
Jumlah Nominal Hasil Pungutan PBB
Kabupaten Semarang
Tahun 1999 – 2002

TAHUN	TARGET	REALISASI
1999	4.243.150.000	5.725.062.391
2000	4.087.000.000	6.601.479.824
2001	7.753.882.000	8.101.722.250
2002	8.499.366.000	6.818.284.567

Dengan bertitik tolak pada sekuensi pemikiran yang demikian, penelitian ini akan difokuskan pada kajian ketaatan wajib pajak membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

1.2. Perumusan Masalah

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak kekayaan (*in rem tax*). Menurut teori Locke⁶ negara adalah pelindung kekayaan. Oleh karenanya, pajak-pajak di atas kekayaan pertimbangan manfaat yang melandasi pengenaan pajak kekayaan adalah bahwa jasa publik telah menaikkan kekayaan riil dan karena itu harus dibayar oleh pemiliknya. Dengan demikian dasar keadilan dalam pembebanan pajak pada PBB tidaklah pada prinsip keuntungan yang diperoleh wajib pajak dari pekerjaan yang dilakukan oleh negara (*benefit*

⁶ Richard A. Musgrave, dan Peggy B. Musgrave, Kepuanaan Negara Dalam Teori dan Praktek, Di Indonesia-kan oleh Alfonsus Sirat. Erlangga, Jakarta, 1991. Hal. 441

principle). Namun demikian, secara empiris pembayaran PBB tidaklah dapat dinafikan dari faktor kemampuan membayar. Hanya saja yang terakhir ini tidak menjadi faktor determinan dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Kemampuan membayar seseorang dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu pendapatan, kekayaan, dan besarnya pengeluaran konsumsi seseorang⁷.

Dengan melihat secara sempit lokasi penelitian yang akan dilakukan untuk kepentingan penulisan tesis ini, yaitu di Kabupaten Semarang, muncul permasalahan yang akan dianalisis dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Mengingat bahwa penerimaan daerah dari sektor perpajakan, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Semarang masih merupakan andalan dalam pembiayaan pembangunan, ketaatan membayar pajak merupakan faktor yang harus diperhatikan. Untuk itu perlu dikaji : Bagaimana tingkat ketaatan wajib pajak dalam membayar PBB di Kabupaten Semarang ?
2. Oleh karena pendapatan daerah di Kabupaten Semarang dari sektor perpajakan (khususnya PBB) belum tercapai secara optimal, maka perlu dianalisis : Kendala apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menarik PBB dari wajib pajak dan upaya-upaya apa yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan ketaatan masyarakat dalam membayar PBB ?

⁷ Ibid. Hal. 238 – 241

3. Dalam rangka mengikuti perubahan dalam pembangunan Indonesia, pemerintah telah melakukan reformasi sistem perpajakan sebanyak dua kali. Apakah reformasi sistem perpajakan tersebut dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam membayar PBB ?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melakukan telaah UU tentang PBB beserta dengan implementasinya. Dengan pengkajian ini diharapkan akan dapat memberi gambaran yang lebih komprehensif terhadap permasalahan perpajakan khususnya PBB di Kabupaten Semarang. Sedangkan secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk memahami derajat ketaatan (kepatuhan) wajib pajak PBB dalam membayar pajak. Spektrum baik wajib pajak fiscus dalam memahami maupun mengimplementasikan UU PBB merupakan faktor determinan ketaatan (kepatuhan) wajib pajak PBB. Sementara bagi pemerintah, peningkatan derajat kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang signifikan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
2. Untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi oleh fiscus dan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam melaksanakan pemungutan PBB.
3. Untuk mengetahui apakah reformasi perpajakan dibidang PBB secara kondusif mampu meningkatkan ketaatan wajib pajak untuk membayar

PBB, yang ditunjukkan oleh fenomena adanya peningkatan PAD Kabupaten Semarang yang bersumber dari PBB.

1.4. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian pada dasarnya dapat dipilih menjadi dua bagian, yaitu manfaat yang bersifat umum dan manfaat yang bersifat khusus. Manfaat yang bersifat umum dari penulisan tesis ini adalah diharapkan akan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu hukum pajak.

Sedang manfaat secara khusus dari penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan masukan atau informasi oleh Pemerintah Kabupaten Semarang didalam meningkatkan PAD yang bersumber dari PBB.
2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai bahan untuk menjadi dasar penyusunan kebijakan dalam penegakan hukum pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah bagi penelitian selanjutnya dan perkembangan ilmu khususnya ilmu hukum.

1.5. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ada 2 (dua) metode yang dapat digunakan, yakni metode penelitian hukum normatif (*legal research*) dan metode Penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*).

a. Metode Penelitian Hukum Normatif (*legal research*).

Metode Penelitian Hukum Normatif (*legal research*) merupakan penelitian hukum literatur atau *law in books* yang bertujuan untuk meneliti dan mengetahui bagaimana suatu peraturan hukum dibentuk dan ditetapkan. Baik di teliti dari sudut pandang falsafat hukum, kepentingan subyek dan obyek hukum, berarti hukum maupun kapan ditetapkan sebagai suatu peraturan hukum, asas hukum, sinkronisasi hukum dan lain-lain.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian hukum normatif ada beberapa macam, yaitu ;

1. Penelitian inventarisasi hukum.
2. Penelitian hukum inconcreto bagi peristiwa konkrit tertentu.
3. Penelitian hukum untuk menemukan azas-azas hukum tertentu.
4. Penelitian terhadap sistematika internal dari suatu peraturan perundang-undangan hukum positif.
5. Penelitian terhadap tingkat sinkronisasi vertikal maupun horisontal peraturan perundang-undang hukum positif.

6. Penelitian perbandingan hukum positif⁸.

Sedang menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif yang juga disebut penelitian terhadap data sekunder dapat dibagi menjadi ;

1. Penelitian terhadap azas-azas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum.

Untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif (dalam hal ini yang tertulis, oleh karena menyangkut penelitian hukum normatif, atau mungkin hukum tercatat) diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum atau "*gegevens van het recht*" (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto 1982 : 14). Unsur –unsur hukum tersebut mencakup unsur idiel dan unsur real. Unsur idiel tersebut mencakup hasrat susila dan rasio manusia. Hasrat susila tersebut menghasilkan azas-azas hukum ("*rechtsbegizelen*"), misalnya, tidak ada hukum tanpa kesalahan ("*geen straf zonder schuld*"). Rasional manusia menghasilkan pengertian pokok atau dasar dalam hukum seperti masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal.12 – 26

hukum dan obyek hukum. Unsur riil mencakup manusia, kebudayaan (material) dan lingkungan alam, yang menghasilkan tata hukum⁹.

b. Metode Penelitian Hukum Sosiologis (*socio legal research*).

Metode penelitian hukum sosiologis ialah penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian ilmu sosial. Penelitian hukum sosiologis ini pada dasarnya meneliti implementasi atau penerapan suatu peraturan hukum didalam masyarakat atau *law in action*. Oleh karena itu beberapa metode penelitian sosial digunakan sebagai metode pendekatan hukum yang bersifat empiris tentang perilaku masyarakat terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan hukum positif.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian hukum yang sosiologis memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif. Sehingga langkah-langkah dan disain-disain teknis penelitian hukum yang sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi, oleh karena itu penelitian hukum ini disebut penelitian hukum yang sosiologis atau socio-legal research. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian hukum sosiologis dapat dibagi menjadi;

1. Kuantitatif – deduktif – positivisasi.
2. Kualitatif – induktif – fenomenologis¹⁰.

⁹ Prof. Dr. Soerjono Sockanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, Hal. 15-16

¹⁰ Opcit, Hal. 35

Jika masalah sosial yang menjadi fokus penelitian telah dipilih dan bentuk dampak hasil studi telah ditentukan, berarti seperangkat variabel tentang masalah sosial yang menjadi cangkupan dalam penelitian dapat diidentifikasi. Menurut Sudarwan Danim, gejala yang ada dalam diri manusia terutama yang menjelma dalam bentuk perilaku atau gejala, meskipun turut dibentuk oleh proses alamiah atau faktor bawahan, akan tetapi lebih banyak ditentukan oleh proses interaksi dan apa yang dapat di inderakan berupa suatu simbol. Adapun variabel - variabel simbolit dimaksud antara lain adalah sikap, kebiasaan, lebel, persepsi, proses perseptual, hukum, motivasi, antusiasme, dan morale¹¹.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas maka penelitian “Ketaatan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Semarang” dilaksanakan. Penelitian ini diharapkan mampu mengungkapkan berbagai faktor disekitar derajat kepatuhan wajib pajak PBB untuk membayar besarnya pajak yang terutang di Kabupaten Semarang. Norma yang menjadi dasar ditegakkannya ketentuan-ketentuan dalam UU PBB diharapkan dapat ditegakkan dengan indikator wajib pajak secara sadar mau membayar pajak yang terutang. Hasil pemungutan PBB, pada akhirnya dapat dipergunakan untuk mendanai pembangunan di Kabupaten Semarang.

¹¹ Sudarman Danim, Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, Hal. 150

1. Objek atau fokus penelitian

Fokus penelitian ini adalah perilaku wajib pajak membayar PBB sebagai bentuk pemenuhan kewajiban UU PBB.

2. Metode pendekatan

Penelitian ini mempergunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dipergunakan untuk melakukan pendekatan terhadap rumusan permasalahan penerapan/implementasi hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan agar dapat memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang sedang diteliti, baik dari aspek hukum dan data empiris yang diperoleh dari realita pada masyarakat di Kabupaten Semarang. Dalam penelitian ini UU No. 12 Tahun 1985 Jo UU No. 12 tahun 1994 selain dipandang sebagai bentuk peraturan (*rule*) juga dikonseptualisasikan sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam proses pembayaran PBB¹². Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa paradigma yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah hukum sebagai perilaku individu dari wajib pajak. Paradigma tersebut kemudian disusun dalam tata urutan kuantitatif – deduktif – positivisasi yang tujuannya bersifat eksplanatoris (menjawab) rumusan permasalahan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini digunakan metode studi kasus, meneliti sampel yang digunakan.

¹² Sutandyo Wignycsubroto dalam Paulus Hadisuprpto, Metode Normatif Dalam Penelitian Hukum, Makalah Penataran Metodologi Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dengan Penekanan Bidang H5

3. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan permasalahan melalui kajian ilmiah khususnya ilmu hukum. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang kualitatif yaitu peneliti langsung ke lapangan atau lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti merumuskan masalah secara lebih spesifik sesuai dengan pokok masalah penelitian.

Metode deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam metode deskriptif peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. Adakalanya peneliti mengadakan klasifikasi, serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu sehingga banyak ahli menamakan metode deskriptif ini dengan nama survei normatif

(*normative survey*). Dengan metode deskriptif ini juga diselidiki kedudukan (status) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain. Karenanya, metode deskriptif juga dinamakan studi status (*status study*).

Metode deskriptif juga ingin mempelajari norma-norma atau standar-standar, sehingga penelitian deskriptif ini disebut juga survei normatif. Dalam metode deskriptif dapat diteliti masalah normatif bersama-sama dengan masalah status dan sekaligus membuat perbandingan-perbandingan antar fenomena. Studi demikian dinamakan secara umum sebagai studi atau penelitian deskriptif, adalah waktu sekarang, atau sekurang-kurangnya jangka waktu yang masih terjangkau dalam ingatan responden¹³.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian “KETAATAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KABUPATEN SEMARANG” ini ialah seluruh wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang berdomisili di Kabupaten Semarang. Definisi populasi dikemukakan oleh Moh Nazir, Ph. adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Kualitas atau ciri tersebut dinamakan variabel. Sebuah populasi dengan jumlah individu tertentu dinamakan populasi *finit* sedangkan jika jumlah individu dalam kelompok

¹³ Moh. Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 63-64

tidak mempunyai jumlah yang tetap, ataupun jumlahnya tidak terhingga, disebut populasi *infini*. Misalnya, jumlah petani dalam sebuah desa adalah populasi *finit*. Sebaliknya, jumlah pelemparan mata dadu yang terus menerus merupakan populasi *infini*¹⁴.

Definisi populasi dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu¹⁵. Sedang pengertian populasi menurut Masri Singarimbun ialah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi dapat dibedakan pula antara populasi sampling dengan populasi sasaran¹⁶.

Mengingat banyak dan luasnya daerah populasi, maka di dalam penelitian ini digunakan sampel penelitian. Pengambilan sample merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. Metode pemilihan sampel yang digunakan yaitu tehnik non random sampling atau quota sampling. Quota sampling dirumuskan sebagai suatu proses penarikan sample untuk memperoleh suatu jumlah tertentu dari unsur-unsur yang diinginkan dengan cara memilih yang paling mudah

¹⁴. Ibid, hal. 325

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 44

¹⁶ Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta, 1995, hal. 152

dicapai sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan daftar wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Semarang, dengan memilih 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Ungaran, Kelurahan Sidomulyo dan Kelurahan Gedanganak dipilih yang sesuai dengan pokok permasalahan. Sehingga dapat dikatakan pula sampel penelitian merupakan *purposive sampling* atau penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek disesuaikan dengan tujuan penelitian.

5. Lokasi penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Ungaran, Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian lebih diarahkan pada sektor perkotaan yang pada prinsipnya telah menerapkan konsep murni. Pertimbangan pemilihan lokasi juga didasarkan pada keterbatasan waktu dan dana yang dipergunakan untuk menopang penelitian ini, sehingga dari Kecamatan Ungaran secara *purposive* hanya dipilih 3 (tiga) Kelurahan saja.

6. Metode pengumpulan data

Penelitian ini akan didukung oleh dua kelompok data jika dilihat dari sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya. Dalam penelitian tesis ini, data primer diharapkan akan diperoleh dari wajib pajak di wilayah Kabupaten Semarang, Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Semarang, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB), Direktorat Jendral Pajak Propinsi Jawa Tengah, Kantor Kecamatan Ungaran, 3 (tiga) Kantor Kelurahan. Pengumpulan data ini dilakukan agar rumusan permasalahan penelitian yang berkaitan dengan mengapa dan bagaimana ketaatan wajib pajak dalam membayar PBB di Kabupaten Semarang, dapat terjawab dan dapat dianalisis. Demikian juga, data-data ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif faktor-faktor yang secara signifikan berpengaruh terhadap ketaatan wajib pajak di Kabupaten Semarang. Selain itu, data ini juga diharapkan dapat menjelaskan sejauhmana kesiapan wajib pajak di Kabupaten Semarang terhadap pemberdayaan reformasi UU PBB. Untuk mendapatkan data primer, peneliti melakukan wawancara dengan para informan kunci (responden) yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Sedang yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Semarang. Sedang responden lain dalam penelitian ini akan ditentukan secara purposive dimana tidak semua populasi akan diteliti namun hanya terhadap responden yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan. Pada fase pengumpulan

data primer ini akan dilakukan wawancara kepada responden baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur terhadap wajib pajak PBB di Kabupaten Semarang.

b. Data sekunder

Data sekunder¹⁷ adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan melainkan dari studi kepustakaan dan dokumen, jurnal, majalah ilmiah, koran, pendapat-pendapat ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan topik yang menjadi fokus tesis ini.

Jenis data yang diharapkan dapat dikumpulkan meliputi kelompok :

- 1) Klasifikasi penggolongan dan ketentuan nilai jual obyek Pajak Bumi dan Bangunan,
- 2) Jumlah nominal hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang disumbangkan bagi total pendapatan asli daerah (PAD),
- 3) Jumlah nominal pendapatan asli daerah dari sektor PBB dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir,
- 4) Jumlah nominal pendapatan Kabupaten Semarang dari PBB selama kurun waktu 3 tahun terakhir.

¹⁷ David M Stewart, Secondary Research. Information Sources and Methods, Sage Publications, Newbury Park, London, 1984, Hal. 11 – 12

7. Metode analisis data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data dengan teknik sebagai berikut ;

1. Editing, yaitu memeriksa dan menyeleksi semua data yang masuk baik kelengkapan jawaban, kejelasan, konsistensi jawaban, relefansi bagi penelitian maupun keragaman data yang dikumpulkan.
2. Coding, yaitu pemberian kode data yang telah terkumpul dan selesai diproses editing sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
3. Tabulasi, yaitu pembuatan tabel-tabel jawaban responden sesuai dengan relefansi pertanyaan yang diajukan kepada responden serta permasalahan penelitian. Analisis dan konstruksi data sangat erat hubungannya dengan pencatatan serta pengolahan data. Mencari nilai data rata-rata, nilai tengah maupun nilai terbesar dari suatu kelompok, sudah merupakan kegiatan untuk menganalisis data, yang kemudian dapat dilanjutkan dengan kontruksinya baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa hal-hal tersebut hanya menyangkut analisis terhadap satu variabel belaka, tanpa usaha untuk mencari kemungkinan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih¹⁸.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988. Hal. 84

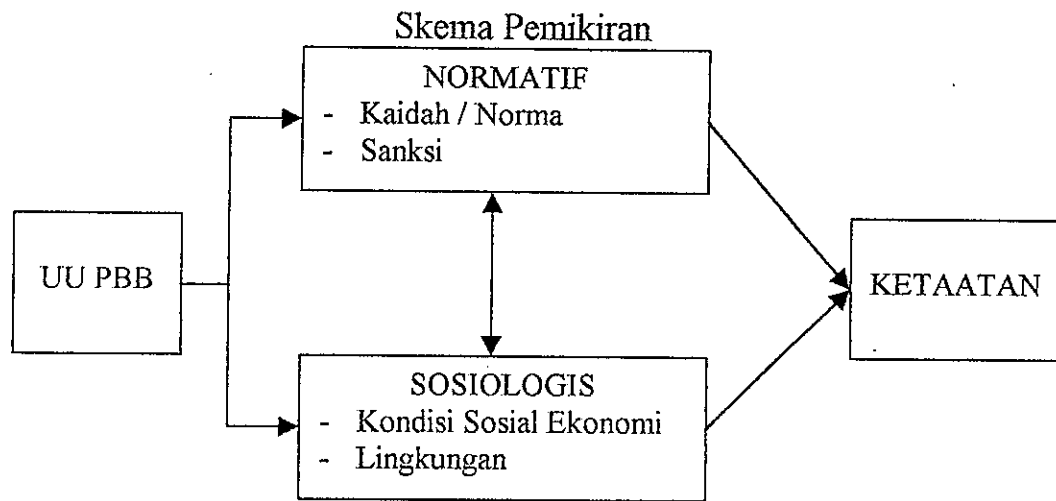
1.6. Kerangka Teoritik

Terminologi ketaatan dan kepatuhan dalam tesis ini dipergunakan secara bergantian, dengan maksud untuk menggambarkan suatu keadaan perilaku dari anggota masyarakat yang berkesesuaian dengan hukum yang berlaku. Secara dikotomis, seseorang dikatakan patuh atau taat apabila dia berperilaku atau bertindak sesuai dengan norma yang telah ditetapkan dalam UU. Norma yang hendak dijadikan tolok dalam penelitian ini adalah UU PBB beserta dengan peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, hukum pada dasarnya merupakan konkretisasi dari system nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sedang wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

Wajib Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan (WP PBB) adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan konsep pemahaman yang seperti ini, pemungutan PBB tidak senantiasa dikaitkan dengan hak wajib pajak terhadap obyek pajak. Subyek pajak dapat saja mereka sebagai pemegang hak (dalam konsep yuridis) atau bukan sebagai pemegang hak. Dengan demikian, konsep subyek pajak atau wajib pajak jauh lebih luas daripada konsep kepemilikan secara yuridis.

Secara konseptual, pengertian dari ketaatan atau kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat diartikan sebagai kesediaan dari orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, untuk membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk melakukan pengukuran apakah seseorang itu dianggap patuh atau taat membayar pajak adalah apakah wajib pajak telah membayar pajak pada saat hutang pajak tersebut menjadi jatuh tempo. Ada dua cara melakukan penetapan kapan suatu hutang pajak pada PBB menjadi jatuh tempo, yaitu pendekatan pada ketentuan peraturan perundang-undangannya sendiri dan pendekatan praktis sosiologis.

Dengan demikian, maka digunakan dua pendekatan metodologi yaitu pendekatan metodologi yuridis normatif dan pendekatan metodologi yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk meneliti norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang digunakan sebagai pembenar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Sedang pendekatan metodologi yuridis sosiologis digunakan untuk meneliti tingkat ketaatan wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Secara grafis dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber diadaptasi dari : Paradigma ganda dengan 2 (dua) variabel independen dan 1 (satu) dependen. (Sugiyono)¹⁹.

1.7. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk memberikan gambaran tesis secara komprehensif, berikut ini akan dikemukakan sistematika tesis yang ditulis sebagai berikut :

Pada bab pendahuluan, akan diuraikan tentang latar belakang mengapa penulis memilih permasalahan ini, rumusan masalah yang akan menjadi focus penuntun dalam penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian terhadap permasalahan yang telah ditetapkan. Telaah pustaka diarahkan pada pemilihan teori yang diharapkan akan dipergunakan untuk menjadi pisau analisis terhadap data-data yang telah terkumpul. Metode penelitian yang akan menjadi tolak

¹⁹ Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung, 1992, Hal. 29

penguji keilmiahan dari penulisan tesis ini diuraikan pada bagian akhir dari bab pendahuluan.

Pada bab telaah pustaka, penulis akan mempertajam bingkai teori yang akan dipergunakan untuk menganalisis (temuan) data yang telah dikumpulkan. Teori sikap akan dikupas lebih banyak dan lebih tajam agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap teori itu sendiri. Untuk melengkapi teori sikap yang dikemukakan oleh Bimo Walgito dengan memodifikasi pemikiran dari Mar'at juga akan dilengkapi dengan teori pertukaran individu yang dikemukakan oleh George C Homans. Kedua teori tersebut diharapkan dapat memberikan kerangka konsep mengapa orang mau membayar PBB pada daerah penelitian. Penulis juga berpendapat bahwa meskipun bab ini dititik beratkan pada penajaman teori yang dipilih untuk menganalisis data, perlu dilengkapi dengan uraian tentang pajak dan hukum pajak yang terkait erat dengan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada bab hasil penelitian dan analisis data akan diuraikan tentang data-data hasil penelitian yang relevan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan. Data-data yang terkumpul langsung akan dianalisis dengan mempergunakan metode analisis yang telah dipilih dan dipaparkan pada bab pendahuluan. Analisis domain dan taksonomis akan dipergunakan untuk menjawab rumusan permasalahan pertama dan kedua, sedang analisis kuantitatif akan dipergunakan untuk menganalisis rumusan permasalahan ke tiga. Analisis secara keseluruhan pada akhirnya akan

diarahkan untuk menjawab semua rumusan permasalahan. Kesenjangan antara das solen dengan das sein juga akan dianalisis dengan melihat pada berbagai faktor yang menghambat pemungutan PBB di Kabupaten Semarang.

Pada bab kesimpulan dan saran akan diuraikan kristalisasi dari hasil analisis pada bab sebelumnya (bab hasil penelitian dan analisis) dalam bentuk kesimpulan. Dengan bertitik tolak dari analisis juga akan dirumuskan rekomendasi yang diharapkan berguna bagi Pemerintah Kabupaten Semarang. Kesimpulan dan saran akan disusun berdasarkan sekuensi rumusan permasalahan untuk menarik benang merah tesis ini dari bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka dan bab hasil penelitian dan analisis.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Penelitian dan kajian masalah ketaatan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat didekati dari 2 (dua) terminologi, yakni pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis. Pendekatan yuridis normatif diperlukan karena pemungutan pajak berkaitan dengan kekayaan pribadi warga negara wajib pajak menjadi hak kekayaan publik (negara) yang harus dilaksanakan dengan alasan pembenar berupa undang-undang atau peraturan hukum normatif. Sedang pendekatan sosiologis diperlukan karena pemungutan pajak berkaitan dengan hak dan kewajiban masyarakat yang harus memperoleh perlindungan negara. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan implementasi suatu kebijakan hukum yang langsung mempengaruhi perilaku masyarakat. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan *law in action*, penerapan hukum dalam masyarakat, yang harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Suatu undang-undang yang tidak memperhatikan rasa keadilan masyarakat bukanlah suatu hukum, tetapi kesewenang-wenangan. Dalam hubungan dengan wadah masyarakat dimana hukum itu bekerja berdampingan dengan pranata sosial yang beroperasi secara "informal". Dari sudut penglihatan seperti ini, maka hukum boleh dilihat sebagai kerangka luar (*outer framework*) berhadapan dengan tertib sosial yang substansial (*inner order of*

society)²⁰. Sebagai suatu implementasi kebijakan hukum, maka kriteria ketaatan wajib Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor pengaruh sosiologis.

2.1. Terminologi Pendekatan Yuridis Normatif

Sebagai bentuk “pungutan” yang diklasifikasikan sebagai pajak, PBB haruslah memenuhi unsur sebagai berikut :

1. PBB merupakan peralihan kekayaan dari sektor privat ke sektor publik.
2. Pemungutannya (harus) didasarkan pada UU, sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan.
3. Terhadap pembayaran PBB tidak diberikan jasa timbal (tegen prestasi) yang sifatnya individual.

Rasionalisasi bahwa pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang dapat didekati dari dua cara. Pertama, dari pendekatan secara yuridis formal dapat dirujuk pada Pasal 23 ayat (2) UUD’45, yang menegaskan bahwa setiap pajak untuk kepentingan negara harus berdasarkan pada undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak akan konstitusional apabila didasarkan pada undang-undang. Jika tidak demikian berarti inkonstitusional. Kedua, adalah pendekatan secara filosofis. Pendekatan ini bertitik tolak pada pencarian landasan pembenaran atas peralihan kekayaan dari sektor privat ke

²⁰ Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1980, Hal. 53

sektor publik. Supaya peralihan kekayaan memiliki dasar pembenaran haruslah memperoleh persetujuan dari wajib pajak. Dalam konsepsi negara modern, bentuk persetujuan ini diberikan melalui lembaga perwakilan, dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan diperolehnya persetujuan, pembayaran pajak tersebut, secara filosofis, memiliki dasar pembenarannya²¹.

Pertanyaan lain yang muncul erat kaitannya dengan dua pendekatan tersebut di atas adalah apakah negara memiliki hak untuk membebani rakyatnya dengan kewajiban untuk membayar pajak ? Terhadap permasalahan ini melahirkan beberapa teori yang mencari pembenaran terhadap pemungutan pajak. Beberapa teori yang menonjol berkaitan dengan ini adalah teori asuransi, teori kepentingan modern, teori daya pikul, dan lain-lain. Memang diantara teori-teori tersebut tidak dapat dijelaskan teori mana yang paling benar sebab masing-masing teori memiliki keunggulan dan sekaligus memiliki kelemahan yang sifatnya prinsipil. Sebagai suatu kajian akademis, apapun bentuknya, pemikiran-pemikiran tersebut haruslah dihargai.

Secara teoritis, PBB termasuk pada jenis pajak yang timbulnya menganut pada teori ajaran hutang pajak formal. Teori ini bertitik tolak bahwa seseorang akan mempunyai hutang PBB apabila telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dalam UU tentang PBB dikenal dengan nama Surat Ketetapan Pajak Terhutang (SPPT). Tanpa diterbitkannya SPPT,

²¹ Lihat lebih jauh Rochmat Soemitro, Azas dan Dasar Perpajakan, Buku I, PT Eresco, Bandung, 1989

seseorang tidak akan pernah mempunyai hutang pajak. Sebagai pembanding, selain dikenal teori formal juga dikenal teori materiil. Teori yang terakhir ini berpandangan bahwa hutang serta merta ada apabila terpenuhinya tiga syarat secara simultan, yaitu adanya undang-undang yang menjadi dasar pemungutan pajak, terpenuhinya syarat subyektif dan syarat obyektif dan terpenuhinya saat yang ditentukan didalam undang-undang. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak akan pernah ada hutang pajak. Dibandingkan dengan teori formal, pada teori materiil hubungan hukum antara negara dengan wajib pajak tidak digantungkan pada penetapan pemerintah dengan cara menerbitkan SPPT.

Masih dari pendekatan teoritis, stelsel yang dipergunakan dalam penentuan hutang pajak pada UU PBB dianut stelsel fiktif. Pemikiran yang demikian didasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 tahun 1983 jo. UU No. 12 tahun 1994 yang menentukan bahwa : "saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan obyek pajak pada tanggal 1 Januari". Pasal ini menetapkan bahwa hutang pajak dalam tahun pajak berjalan, yaitu satu tahun takwin, dihitung dari obyek pajak yang dimiliki oleh subyek pajak pada awal tahun pajak. Kelemahan mendasar dari stelsel fiktif ini adalah pembebanan pajak terhadap wajib pajak sering kali tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Kondisi yang demikian ini dapat terjadi apabila dalam tahun pajak berjalan terjadi mutasi terhadap obyek pajak, hal yang demikian ini tidak mengakibatkan perubahan (baca : pengurangan) hutang

pajak. Stelsel lain dalam menentukan hutang pajak adalah stelsel riil. Dalam stelsel ini hutang pajak dihitung dari obyek pajak yang benar-benar dimiliki/diterima oleh wajib pajak sepanjang tahun pajak. Stelsel ini memiliki keunggulan karena dapat menghitung pembebanan pajak secara tepat, tetapi lemah karena hutang pajak baru akan dapat dihitung setelah tahun pajak berakhir.

Untuk keperluan sistem pemungutan, semua obyek PBB diklasifikasikan menjadi 5 sektor dengan mempertimbangkan faktor letak dan pemanfaatan obyek pajak, yaitu :

1. Obyek PBB sektor perkotaan,
2. Obyek PBB sektor pedesaan,
3. Obyek PBB sektor perkebunan,
4. Obyek PBB sektor pertambangan,
5. Obyek PBB sektor kehutanan.

Dalam kaitannya dengan bagaimana PBB dipungut (sistem pemungutan), dari kelima kategori tersebut dapat dipilah menjadi dua bentuk²² yaitu, pertama pemungutan PBB dengan sistem tempat pembayaran (sistep) yang dilaksanakan secara murni. Sistem murni ini sekarang diterapkan untuk obyek PBB sektor perkotaan, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Sistep (Sistem Tempat Pembayaran) adalah tata cara pembayaran, penyetoran, pelimpahan, dan

²² Pemilahan ini didalam praktek tidak selalu dianut secara kaku

pembagian hasil penerimaan PBB melalui tempat pembayaran yang telah ditentukan. Berbagai pertimbangan yang melatar belakangnya adalah lokasi tempat pembayaran (biasanya bank atau kantor pos) tidak terlalu jauh dengan tempat tinggal wajib pajak dan tingkat pemahaman aspek administratif wajib pajak (relatif) lebih tinggi. Kedua, pemungutan PBB dengan system tempat pembayaran (sistep)²³ yang belum murni (semi sistep). Untuk yang terakhir ini diberlakukan untuk obyek PBB yang termasuk pada kategori sector pedesaan. Berbagai pertimbangan yang melatar belakanginya adalah lokasi tempat pembayaran PBB biasanya jauh dari tempat tinggal wajib pajak sedang besarnya pajak terutang relatif tidak terlalu besar²⁴, dan tingkat pemahaman aspek administratif wajib pajak masih relatif rendah. Salah satu penelitian tentang system pemungutan PBB di Desa Badran, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang diperoleh data bahwa hutang PBB bagi warga desa tersebut (wajib pajak) pada tahun 1994 berkisar antara Rp. 450,- s/d Rp. 27.000,-. Sedang kalau setiap wajib pajak harus membayar sendiri pajaknya biaya transportasi dari tempat tinggal mereka sampai di Bank persepsi yang ditunjuk berkisar antara Rp. 1.600,- s/d Rp. 3.000,-.

²³ -----, Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PBB Dengan Sistem Tempat Pembayaran, Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Pajak, Jakarta, 1991

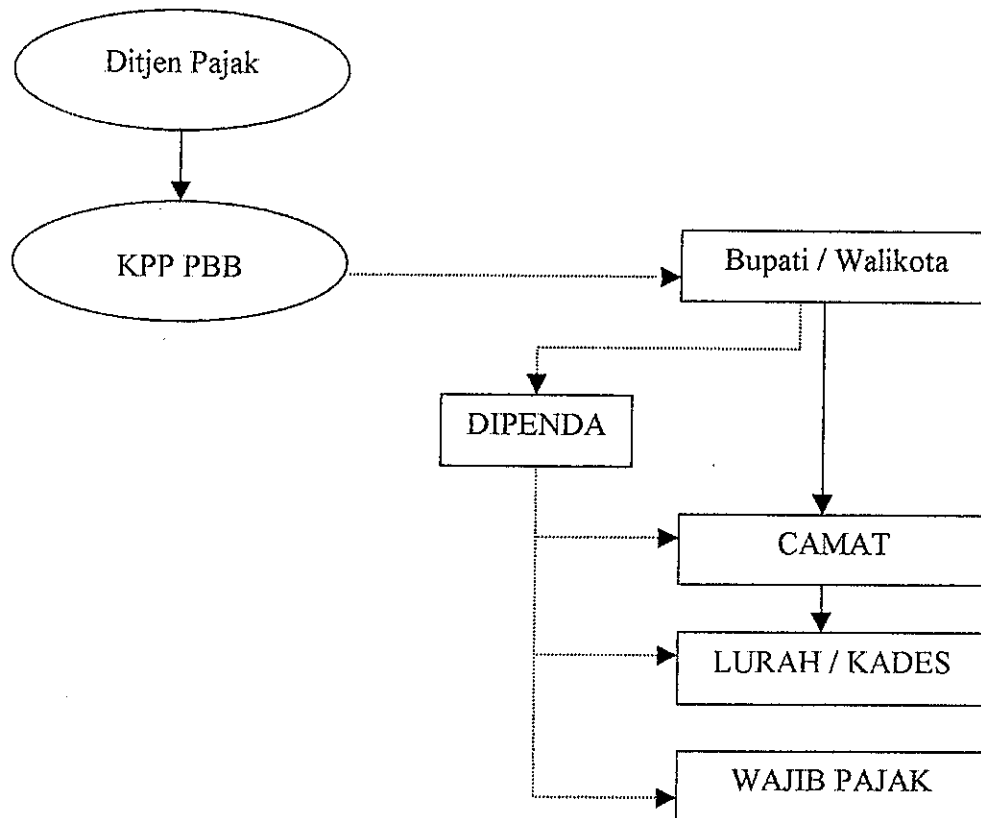
²⁴ Tri Budiyo, SH : Sistem Pemungutan PBB (studi kasus di desa Badran, Kec. Susukan, Kab. Semarang pada Th. 1993 – 1994)

Dengan demikian ada perbedaan yang mendasar pada pemungutan PBB untuk wajib pajak yang mempergunakan sistep murni dan yang mempergunakan semi sistep. Perbedaan ini terletak pada tingkat kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak atas inisiatifnya sendiri dan juga peran Kepala Desa atau Lurah untuk melakukan pemungutan pajak. Namun demikian, dari keduanya terdapat juga persamaan yang mendasar, yaitu pada system penyebaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada wajib pajak melalui jalur birokrasi Bupati atau Walikota kepada Camat, selanjutnya kepada Lurah atau Kepala Desa.

Secara skematis , system jalur berkas administratif PBB dan system pemungutan PBB adalah sebagai berikut :

Skema Jalur Berkas Administrasi

PBB dan Sistem Pemungutan



----- : Garis Pengawasan Tidak Langsung

————— : Garis Pengawasan Langsung

Sumber : Wawancara dengan KPP PBB Ungaran, Jawa Tengah

Dari bagan tersebut dimuka, dapat dibaca bahwa petugas yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan pemungutan PBB adalah Bupati atau Walikota dengan instansi vertikal di bawahnya. Pada tingkat terakhir, Kepala Desa yang berhadapan secara langsung dengan wajib pajak. Bagaimana kepala desa berperan dalam pemungutan PBB menurut penulis menjadi sangat menarik, oleh karena berhasil tidaknya pemungutan pajak akan mempengaruhi

penilaian tampilan Kepala Desa oleh atasannya langsung, yaitu Camat, demikian juga pada arus Kecamatan, berhasil tidaknya pemungutan pajak di suatu Kecamatan akan mempengaruhi penilaian tampilan Camat oleh atasan langsungnya, yaitu Bupati atau Walikota. Ukuran keberhasilan seorang Kepala Desa dalam pemungutan PBB terletak pada berhasil tidaknya Kepala Desa membayarkan target PBB yang dibebankan (lebih terutang) pada wajib pajak di desa yang bersangkutan sebagai satu kesatuan.

Bentuk rantai birokrasi yang pengawasannya dilakukan dengan penilaian tampilan oleh birokrat di atasnya akan mempengaruhi perilaku birokrat yang dinilai untuk memenuhi presentasi yang menjadi (salah satu) obyek penilaian (dalam hal ini adalah pemenuhan target PBB), bagaimanapun caranya. Kepala Desa sebagai pemimpin yang mempunyai kedudukan dualistis, karena ia dipilih oleh penduduk desa sehingga Kepala Desa harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada penduduk desa, pada sisi yang lain Camat menganggap Kepala Desa sebagai pintu masuk segala program Pemerintah Pusat di daerah, sehingga Lurah diperlakukan seolah-olah sebagai pegawai Pemerintah Pusat, berada pada posisi yang dilematis²⁵.

²⁵ Nico Schulte Nordholt : Ojo Dumeh, Kepemimpinan Lokal Dalam Pembangunan, Sinar Harapan, Jakarta, 1987, Hal. 199

2.2. Terminologi Pendekatan Sosiologi

Untuk mengukur tingkat ketaatan masyarakat wajib Pajak Bumi dan Bangunan dari sudut sosiologi dapat didasarkan pada pendapat Grindle dalam bukunya “*Political and Implementation in the Third World*” mengatakan :

1. *Variabel Content* / isi kebijakan, yaitu segala sesuatu yang ada dalam kebijakan publik yang berpengaruh terhadap proses implementasi. Variabel tersebut meliputi : pihak yang kepentingannya dipengaruhi; jenis manfaat yang bisa diperoleh; jangkauan perubahan yang diharapkan; letak pengambilan keputusan; pelaksanaan-pelaksanaan program; sumber-sumber yang dapat disediakan.
2. *Variabel Konteks*, yaitu bagaimana suatu konteks atau lingkungan politik dan aktivitas administrasi mempengaruhi kebijakan publik yang akan diimplementasikan. Variabel ini meliputi : kekuasaan; kepentingan dan strategi-strategi dari para aktor yang terlibat; ciri-ciri kelembagaan dan rezim; konsistensi dan daya tangkap²⁶.

Menurut pendapat di atas suatu kebijakan yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan tidak bisa mengabaikan pengaruh sosial. Variabel isi kebijakan yang memberikan kewajiban pada masyarakat untuk membayar pajak berarti mempengaruhi kepentingan masyarakat yang harus memperhitungkan manfaat yang bisa

²⁶ Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, Hal 2

diperoleh, jangkauan perubahan yang diharapkan, dan sumber-sumber yang dapat disediakan. Kewajiban membayar pajak meskipun didasarkan pada peraturan perundang-undang yang mempunyai kekuatan memaksa selama ini tidak pernah memperhitungkan kemampuan serta besar manfaat secara langsung yang diperoleh oleh masyarakat. Misalnya kemampuan ekonomi masyarakat yang tidak mampu untuk membayar pajak apakah harus menjual objek pajak yang dimilikinya. Hal-hal seperti contoh ini dapat mengurangi pendapatan daerah dari sektor pajak tetapi tidak dapat diindikasikan sebagai bentuk ketidaktaatan wajib pajak. Grindle juga menunjuk variabel lingkungan politik dan aktivitas administrasi mempunyai pengaruh terhadap ketaatan wajib pajak. Variabel ini lebih menekankan pada sikap pelaksana (Aparatur Pemerintah Daerah) didalam mensosialisasikan kebijakan perpajakan kepada masyarakat. Potensi ketepatan penggunaan metode sosialisasi akan mempengaruhi tingkat ketaatan wajib pajak.

Untuk meneliti suatu kebijakan secara ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan dalam batas-batas yang tidak berbenturan terlalu keras dengan *political will* atau lingkungan sosial politik dapat dilakukan dengan proses kerja ilmiah yang meliputi :

1. Identifikasi dan formulasi masalah kebijakan.
2. Penentuan alternatif kebijakan untuk pemecahan masalah.
3. Pengkajian atau analisis kelayakan masing-masing alternatif kebijakan.

4. Pelaksanaan kebijakan dengan menentukan standar kinerja (*performance*) minimal.
5. Evaluasi keberhasilan, dengan ukuran-ukuran kuantitatif seperti *cost-benefit analysis*, *cost-effectiveness analysis* dan lain-lain²⁷.

Intervensi kekuatan *sociopolitical environment* dalam order perilaku peneliti kebijakan sudah saatnya beralih dari pola kultur politik yang parokial ke kultur politik partisipan, sehingga rekomendasi yang mereka hasilkan lebih merupakan produk pemikiran rasional-ilmiah daripada merupakan titipan kemauan politik atau birokrasi. Paling tidak, intervensi itu lebih berwujud *political will* yang partisipatif, bukan *political power* yang otoriter. Dalam menyosialisasikan wajib Pajak Bumi dan Bangunan perlu diupayakan tumbuhnya partisipasi masyarakat dengan tingkat kesadaran terhadap hak dan kewajiban secara seimbang. *Political power* yang otoriter sudah tidak tepat lagi digunakan didalam sistem demokrasi. Dengan partisipasi masyarakat akan lebih diperoleh manfaat baik secara politik maupun secara sosial bagi perkembangan pertumbuhan otonomi daerah.

Menurut Soerjono Soekanto suatu kelompok sosial cenderung untuk tidak menjadi kelompok yang statis, akan tetapi selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan baik dalam aktivitas maupun bentuknya. Kelompok tadi dapat menambahkan alat-alat perlengkapan untuk dapat

²⁷ Sudarwan Danim, Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, Hal. 16

melaksanakan fungsi-fungsinya yang baru didalam rangka perubahan-perubahan yang dialaminya, atau bahkan sebaliknya dapat mempersempit ruang lingkup²⁸. Sesuatu aspek yang menarik dari kelompok sosial tersebut adalah bagaimana caranya mengendalikan anggota-anggota kelompoknya. Kelompok sosial akan mengatur tindakan-tindakan anggota-anggotanya, agar tercapai tata tertib didalam kelompok. Kelompok sosial merupakan tempat kekuatan-kekuatan sosial, berhubungan, berkembang mengalami disorganisasi, memegang peranan dan lain sebagainya. Oleh karena itu di dalam mengukur ketaatan suatu kelompok sosial akan lebih tepat apabila menggunakan metode persuasi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

Berbagai ilmuwan atau lembaga memang belum terdapat suatu kesepakatan mengenai definisi dan teori yang digunakan untuk memahami apakah yang dimaksud dengan peran serta atau partisipasi. Gordon W Allport dalam bukunya yang berjudul *The Psychology of Participation* (1945), menyatakan : "*The person who participates is ego-involved instead of merely taks-involved*". Pendapat itu dapat diterjemahkan dengan kalimat sebagai berikut :

"Bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja". Dengan keterlibatan dirinya, berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya. Atau misalnya anda berpartisipasi/ikut serta (dapat anda rasakan sendiri), maka anda melakukan kegiatan itu karena menurut pikiran anda perlu dan bahwa perasaan anda pun menyetujui/berkenan untuk melakukannya.

²⁸ Soerjono Sockanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hal. 127

Ilmuwan Keith Davis dalam bukunya yang berjudul : *Human Relations at Work*, mengemukakan definisinya sebagai berikut : *"Participation can be defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them"*. Selanjutnya ia mengemukakan pula : *"There are three ideas in this definition which are important to managers who will practice the art of participation, most of them do agree on the importance of these three ideas"*.

Pendapat tersebut di atas dapat diterjemahkan sebagai berikut :

"Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan". "Didalamnya terdapat tiga buah gagasan yang penting artinya bagi para manager/pemimpin yang hendak menerapkan seni partisipasi dan kebanyakan dari mereka sependapat dengan tiga buah gagasan tersebut"²⁹.

Dari pendapat Keith Davis di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan yang berarti terdapat rasa senang, kesukarelaan, dan tanggung jawab. Dengan demikian apabila Pemerintah Daerah didalam mensosialisasikan Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat dengan berorientasi tumbuhnya partisipasi masyarakat akan memperoleh ketaatan yang tinggi.

²⁹ Santoso Sastropetro, Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional, Alumni, Bandung, 1988, Hal. 12-13

Subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan diukur dari sudut sosiologi tidak lebih tegas dibanding dengan Pajak Penghasilan. Kalau didalam Pajak Penghasilan pajak dihitung berdasarkan penghasilan wajib pajak sehingga mempermudah pihak wajib pajak, sedang Pajak Bumi dan Bangunan perhitungannya yang menentukan adalah pemerintah. Sehingga apabila terjadi penurunan kemampuan ekonomi wajib pajak akan mempersulit wajib pajak memenuhi kewajibannya. Mengingat sifat Pajak Bumi dan Bangunan yang demikian, maka untuk mengetahui kriteria ketaatan wajib Pajak Bumi dan Bangunan juga perlu dipertimbangkan segi-segi sosiologisnya.

Menurut UU PBB, hutang pajak menjadi jatuh tempo dan harus dibayar paling lambat 6 (enam) bulan setelah wajib pajak yang bersangkutan menerima SPPT. Dengan pendekatan ini, jatuh tempo hutang pajak untuk setiap wajib pajak akan berbeda-beda tergantung dari kapan wajib pajak menerima SPPT. Pendekatan ini baik dan memperhatikan aspek keadilan, namun secara praktis menimbulkan kesulitan yang besar khususnya pada pekerjaan administratif, misalnya untuk menentukan apakah seorang wajib pajak telah terlambat membayar pajak sehingga akan dikenakan denda atau tidak terlambat. Kesulitan administratif ini kemudian menjadi alasan/dasar untuk melakukan pendekatan secara praktis, yaitu hutang pajak pada PBB ditetapkan menjadi jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober untuk setiap tahun pajak. Dengan pendekatan yang terakhir ini, kesulitan administrasi lebih dapat diatasi namun aspek keadilan pada diri wajib pajak dikorbankan.

Secara dikotomis, apakah wajib pajak taat (patuh) atau tidak untuk membayar pajak ditolak-ukuri dengan batas jatuh tempo pembayaran pajak secara praksis tersebut. Pendekatan jatuh tempo secara praktis ini semata-mata untuk mempermudah melakukan penelitian, karena ada indikator yang lebih universal. Kalau wajib pajak membayar pajak sebelum tanggal 1 November (paling lambat tanggal 31 Oktober) pada setiap tahun pajak, maka dia dianggap patuh. Sedang apabila wajib pajak membayar PBB setelah tanggal 31 Oktober tahun pajak berjalan, maka dia diklasifikasikan sebagai tidak taat.

Sementara itu, kepatuhan (ketaatan) yang dapat diukur dari perilaku nyata seseorang, kalau dikaitkan dengan sikap seseorang akan diperoleh konsep yang sifatnya gradatif. Menurut Hoefnagels ketaatan (kepatuhan) memiliki gradasi sebagai berikut :

1. Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya. Hal mana sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang.
2. Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, akan tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hal yang bersangkutan.
3. Seseorang mematuhi hukum, akan tetapi dia tidak setuju dengan kaidah-kaidah tersebut maupun pada nilai-nilai dari penguasa.
4. Seseorang tidak patuh hukum, akan tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai dari mereka yang berwenang.

5. Seseorang sama sekali tidak menyetujui kesemuanya dan diapun tidak patuh pada hukum (melakukan protes)³⁰.

Derajat kepatuhan sebagaimana dikemukakan oleh Hoefnagels tersebut pada dasarnya bertumpu pada tiga faktor, yaitu melakukan atau tidak melakukan kewajiban hukum, faham atau tidak terhadap isi hukum dan setuju atau tidak terhadap nilai yang menjadi dasar penetapan hukum.

Berangkat dari gradasi kepatuhan (ketaatan) yang dikemukakan oleh Hoefnagels tersebut, derajat kepatuhan wajib pajak PBB untuk membayar besarnya pajak yang terutang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Wajib pajak patuh membayar pajak, faham hukumnya dan setuju nilai dasar pembebanan pajak tersebut.
2. Wajib pajak patuh membayar pajak, setuju hukumnya tetapi tidak setuju nilai dasar pembebanan pajak tersebut.
3. Wajib pajak patuh membayar pajak tetapi tidak setuju hukumnya dan nilai dasar pembebanan pajak.
4. Wajib pajak tidak patuh membayar pajak tetapi setuju terhadap hukum dan nilai dasar pembebanan pajak
5. Wajib pajak tidak patuh membayar pajak dan tidak setuju baik terhadap hukum dan nilai dasar pembebanan pajak.

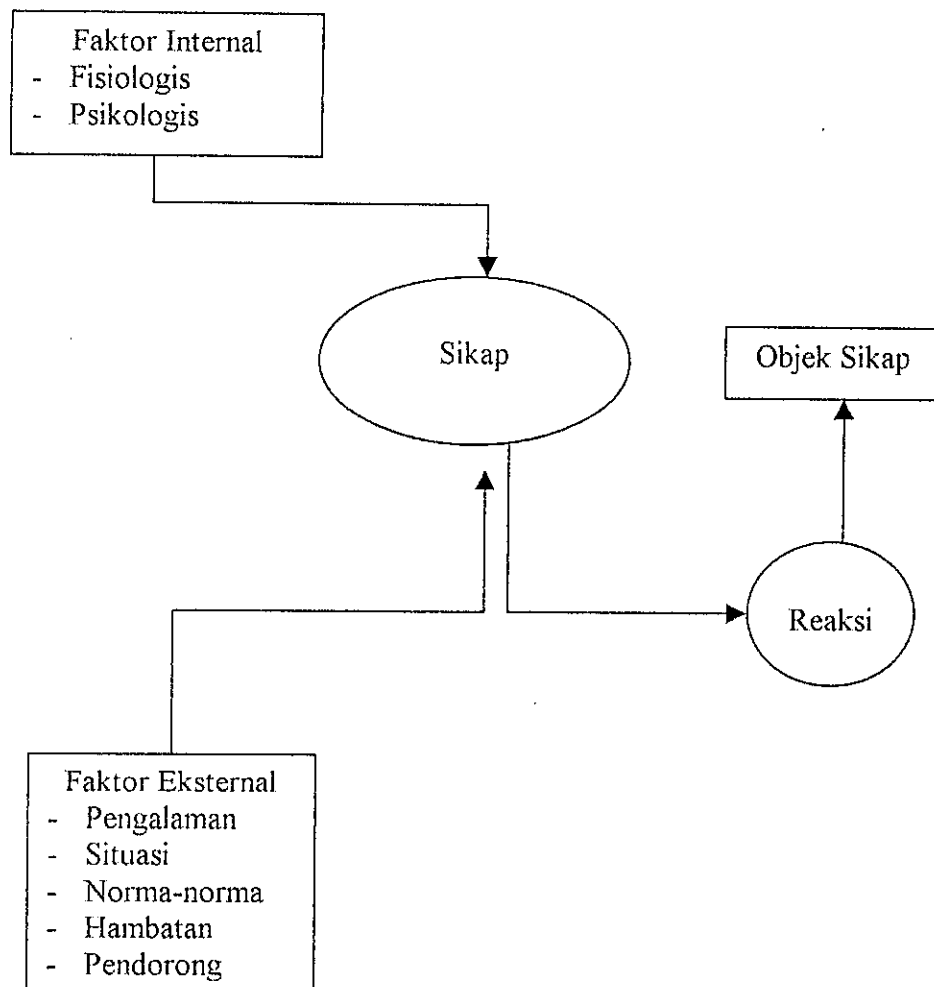
³⁰ Praktikno Warsito, Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Implementasi, Rajawali, Jakarta, 1992, Hal. 32.

Apabila dilihat keterhubungan antara kepatuhan (ketaatan) sikap, diperoleh suatu kesimpulan sementara bahwa ketaatan (kepatuhan) merupakan konkritisasi dari sikap. Atau dengan kata lain bahwa sikap bersifat abstrak dan kepatuhan (ketaatan) bersifat konkrit. Menurut Bimo Walgito, orang tidak dapat mengukur sikap secara langsung. Yang dapat diukur adalah sikap yang nampak. Sikap nampak ini, pada dasarnya merupakan perilaku. Dalam kaitannya dengan pembayaran pajak, perilaku akan mewujudkan dalam kepatuhan (ketaatan).

Bimo Walgito dengan mengutip pendapat dari Mar'at mengkonstruksikan sikap dalam bagan sebagai berikut³¹ :

³¹ Bimo Walgito, Psikologis Pendidikan. Kanisius, Yogyakarta, 1999, Hal. 16

Skema Konstruksi Sikap Manusia



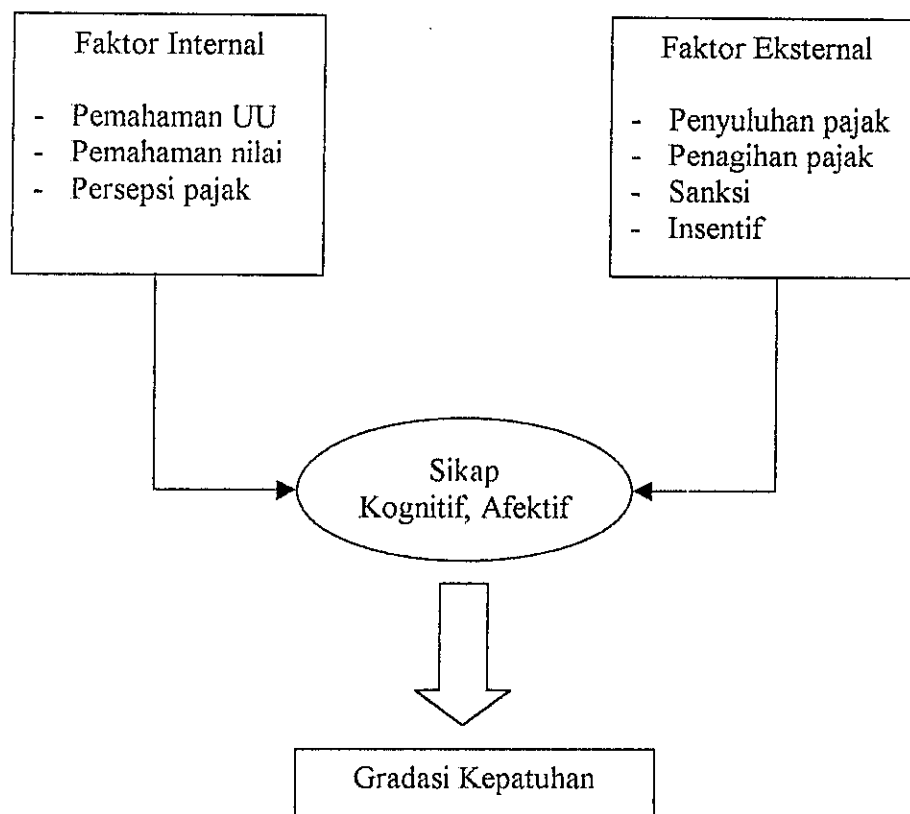
Sumber : Bimo Walgito, 1989 : 16

Dari bagan tersebut dapat dibaca bahwa sikap dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari unsur fisiologis dan unsur psikologis. Sedang faktor eksternal terdiri dari unsur pengalaman, situasi, norma-norma, hambatan dan pendorong. Sikap seseorang

terhadap suatu obyek pada dasarnya dipengaruhi oleh perpaduan antara faktor internal dan faktor eksternal.

Dengan mengadaptasi konstruksi pemikiran Mar'at kemudian dikaitkan dengan derajat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut³² :

Skema Derajat Kepatuhan Wajib Pajak



Sumber : Bagan dimodifikasi dari kor.sep pemikiran Bimo Walgito dengan Soerjono Soekanto tentang Gradasi Kepatuhan Hukum.

³² Bimo Walgito dan Soerjono Soekanto, Psikologis Pendidikan dan Sosiologis, Rajawali, Jakarta, 1990, Hal. 3-4

Dari bagan tersebut dapat dibaca gambaran bahwa sikap wajib pajak untuk membayar PBB yang terutang dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang meliputi pemahaman wajib pajak terhadap dasar yuridis pembebanan PBB, nilai-nilai yang secara filosofis melatarbelakangi pembebanan pajak dan tingkat pendidikan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari intensitas penyuluhan pajak yang dilakukan oleh fiscus, intensitas penagihan pajak, sanksi yang dikenakan terhadap kelalaian membayar pajak dan insentif yang diberikan terhadap wajib pajak apabila patuh membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak membayar PBB juga dapat dilihat dari kerangka teori pertukaran perilaku (*exchange theory*) sebagaimana dikemukakan oleh George C Homans yang kemudian pemikiran-pemikirannya disempurnakan oleh Peter M Blau³³. Cikal bakal teori ini dapat dirunut pada konsep resiprositas (*reciprocity*). Teori pertukaran dilandaskan pada prinsip transaksi ekonomis yang elementer. Orang menyediakan barang atau jasa dan sebagai imbalannya berharap memperoleh barang atau jasa yang diinginkannya. Ahli teori pertukaran memiliki asumsi sederhana bahwa interaksi (sosial) itu mirip dengan transaksi ekonomi. Akan tetapi mereka mengakui bahwa pertukaran sosial tidak selalu dapat diukur dengan nilai uang, sebab dalam berbagai transaksi sosial dipertukarkan pula hal-hal yang nyata dan tidak nyata.

³³ M. Margaret Polama, Sosiologi Kontemporer (Cetakan IV), Alih Bahasa oleh Tim Penterjemah Ysogama. Rajawali Press, Jakarta, 2000

Bertitik tolak dari pemikiran teori pertukaran, interaksi antara wajib pajak PBB dengan fiscus dan/atau pemungut pajak dapat dikonstruksikan sebagai interaksi yang didalamnya mengandung motif resipositas. Wajib pajak bersedia membayar pajak oleh karena dia mengharapkan dapat memperoleh sesuatu. Bahkan mungkin juga pembayaran PBB dilakukan oleh karena adanya tawaran penukaran sesuatu (yang kadang-kadang dipaksakan) oleh pemungut PBB.

2.3. Sistem Pemungutan Pajak

Pada dasarnya ada empat sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *semi self assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*.

- a. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (baca : wajib pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiscus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.
- b. *Semi self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiscus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Pada sistem ini setiap awal tahun wajib

pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak.

- c. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini wajib pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku.
- d. *Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga³⁴.

Di Indonesia dari keempat pemungutan pajak di atas, pelaksanaan *official assessment system* telah berakhir pada tahun 1967, yaitu dengan diundangkannya UU Nomor 8 tahun 1967 tentang Perubahan dan

³⁴ Wirawan B. Ilyas, dan Richard Burton, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2001, Hal. 19-20

Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932, dan Pajak Perseroan 1925 dengan Tata Cara MPS dan MPO.

Dalam *official assessmen system* fiscus mengeluarkan "Surat Ketetapan Sementara" pada awal tahun, yang kemudian dikeluarkan lagi "Surat Ketetapan Pajak Rampung" pada akhir tahun pajak untuk menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya terutang.

Tahun 1968 sampai dengan 1983 masih menggunakan sistem *semi self assessment* dan *withholding* dengan tata cara yang disebut MPS dan MPO. Barulah tahun 1984 ditetapkan sistem *self assessment* secara penuh dalam sistem pemungutan pajak Indonesia, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang mulai berjalan pada 1 Januari 1984.

Sistem dan corak pemungutan pajak nasional berdasarkan UU No. 6 tahun 1983 dan UU No. 9 tahun 1994 perubahan atas UU No. 6 tahun 1983 dapat diklarifikasikan menjadi tiga, yaitu :

1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan. Kewajiban ada pada anggota masyarakat wajib pajak. Sedang pemerintah dalam hal ini aparatatur perpajakan

berkewajiban melakukan pembinaan penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Anggota masyarakat wajib pajak didalam berperan serta diberi kepercayaan untuk melaksanakan perpajakan melalui sistem menghitung dan membayar sendiri pajak terutang (*self assessment system*).

Dengan dasar tiga klarifikasi pemungutan pajak tersebut wajib pajak didalam menjalankan kewajibannya dapat melakukan perhitungan dan membayar sendiri jumlah pajak terutang kepada negara melalui aparat perpajakan. Dari uraian di atas juga dapat diketahui bahwa dengan UU No. 6 tahun 1983 dan UU No. 9 tahun 1994, sistem pemungutan pajak di Indonesia ialah sistem *self assessment*. Antara lain hal tersebut dapat dilihat dari pasal-pasal :

- a. Pasal 2 (ayat 1 dan 2) UU No. 16 tahun 2000 :

- (1) Setiap wajib pajak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP.
- (2) Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya

meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha, dilakukan untuk dikukuhkan Pengusaha Kena Pajak.

b. Pasal 3 (ayat 1, 1a, dan 2) UU No. 16 tahun 2000 :

(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan.

(1a) Bagi wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(2) Wajib pajak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a) harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

c. Pasal 8 ayat (1) UU No. 16 tahun 2000 :

(1) Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

d. Pasal 10 ayat (1) UU No. 16 tahun 2000 :

- (1) Wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang di Kas Negara melalui Kantor Pos dan/atau bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

e. Pasal 12 ayat (1) UU No. 16 tahun 2000 :

- (1) Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak.

Menurut penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU No. 16 tahun 2000, pada prinsipnya pajak terutang pada saat timbulnya obyek pajak yang dapat dikenakan pajak, dan saat terutangnya pajak adalah :

1. Pada suatu saat, untuk pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga;
2. Pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan karyawan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh pengusaha kena pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Pada akhir tahun pajak, untuk Pajak Penghasilan.

Jumlah pajak terutang yang telah dipotong, dipungut, ataupun yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setelah tiba saat atau masa pelunasan pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 dan 10

ayat (2), oleh wajib pajak harus disetorkan ke Kas Negara melalui Kantor Pos dan/atau bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang ini Direktorat Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak. Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidak benaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

2.4. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan merupakan bukti konkrit adanya hak negara (pemerintah) untuk melakukan pemaksaan kepada warga negara (wajib pajak). Dengan sistem *self assessment* dimana wajib pajak mempunyai hak untuk memperhitungkan hutang pajak pada negara dengan adanya sanksi pidana hampir dapat dikatakan tidak ada artinya. Sanksi pidana yang mempunyai kekuatan untuk melakukan pemaksaan menempatkan posisi wajib pajak pada kedudukan yang lemah. Sebaliknya sanksi pidana tersebut lebih menguntungkan aparat perpajakan, karena dengan alasan sanksi pidana

tersebut dapat melakukan negosiasi yang menguntungkan pihak aparat perpajakan.

Sanksi pidana pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam UU No. 6 tahun 1983, kemudian diubah dengan UU No. 9 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua UU No. 6 tahun 1983 serta UU No. 12 tahun 1985 kemudian diubah dengan UU No. 12 tahun 1994 sebagai berikut :

1. Apabila wajib pajak, melakukan kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar/lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar. Maka sanksi pidana bagi wajib pajak adalah pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
2. Sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan atau dokumen lain, dan hal-hal lain. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 KUP, maka :
 - a. Pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
 - b. Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada huruf a dilipat duakan apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

3. Sengaja tidak menyampaikan SPOP atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 PBB, maka pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang.
4. Dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP, memperlihatkan/meminjamkan surat/dokumen palsu, dan hal-hal lain sebagaimana diatur dalam Pasal 25 (1) UU PBB, maka :
 - a. Pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali jumlah pajak yang terutang.
 - b. Sanksi (a) dilipat duakan jika sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani sebagian/seluruh pidana yang dijatuhkan melakukan tindak pidana lagi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

3.1 Sistem Pemungutan PBB

Asas yang dianut dalam system pemungutan PBB pada saat ini ialah system *official assessment* (OA) yaitu suatu system pemungutan pajak yang meletakkan tanggung jawab kepada aparat dan aparatur perpajakan. Sedang wajib pajak dalam system ini berperanan pasif artinya untuk menetapkan besarnya pajak terhutang atau dalam pengisian penentuan SPPT wajib pajak menunggu ketentuan dari pihak aparatur perpajakan. System lain dalam pemungutan pajak ialah sebagai system *self assessment* (SA) dimana system yang dimaksud adalah untuk memberikan kepercayaan kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung dan menetapkan serta membayar sendiri besarnya pajak terhutang. System *self assessment* ini mulai digunakan di Indonesia sejak diberlakukanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo UU No. 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua UU No. 6 tahun 1983 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Asas *self assessment* dalam pengenaan PBB dinilai lebih memberikan rasa keadilan kepada wajib pajak, karena wajib pajak dapat dihindarkan dari perasaan di korbakan oleh pemerintah dengan beban pajak. Wajib pajak yang diberi hak untuk menghitung kewajiban pajaknya sendiri juga akan berakses meningkatkan kesadaran wajib pajak. Mengingat kondisi masyarakat yang sangat heterogen terutama dilihat dari latar pendidikan formal wajib pajak, maka idealnya digunakan juga sistem *official assessment* (OA) yang meletakkan tanggung jawab kepada aparat dan aparatur perpajakan didalam menghitung pajak terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Dalam Pasal 9 UU Nomor 12 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 menetapkan ;

- a. Dalam rangka pendataan, subyek pajak wajib mendaftarkan obyek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.
- b. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak oleh subyek pajak.
- c. Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Dari ketentuan pasal di atas tersirat memberi dukungan kepada setiap wajib pajak untuk berperanan secara aktif mendaftarkan obyek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak. Dengan melibatkan wajib pajak (masyarakat) secara langsung maka kewajiban wajib pajak untuk membiayai kekuasaan pemerintah yang bertumpu hasil pajak sudah tidak bermasalah lagi.

Obyek pajak PBB adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di wilayah Republik Indonesia. Dalam mencerminkan Keikutsertaan dan kegotongroyongan masyarakat di bidang pembiayaan pembangunan, maka semua obyek pajak dikenakan pajak.

Dalam Undang-Undang ini, bumi dan/atau bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikenakan pajak. Penentuan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan atas obyek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan Pemerintah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Hasil penerimaan pajak ini diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan, maka sebagian besar hasil penerimaan pajak ini diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Penggunaan pajak yang demikian oleh daerah akan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak mereka yang sekaligus mencerminkan sifat kegotong royongan rakyat dalam pembiayaan pembangunan.

Karena Pajak Bumi dan Bangunan sebagian besar akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah maka dirasa perlu untuk menetapkan tempat-tempat

pembayaran yang lebih mudah dan dekat sehingga Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat segera memanfaatkan hasil penerimaan pajak guna membiayai pembangunan di masing-masing wilayahnya. Tempat yang lebih dekat tersebut adalah seperti Bank, Kantor Pos, dan Giro serta tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bagi wajib pajak dimungkinkan memperoleh pengurangan atas pembayaran pajaknya, karena sebab-sebab tertentu atau dalam hal obyek pajak ditimpa bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, sehingga wajib pajak tidak mampu membayar hutang pajaknya.

Kabupaten Semarang sebagai daerah otonom penerapan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka Pajak Bumi dan Bangunan salah satu potensi yang sangat besar dalam memberikan kontribusi pendapatan daerah dalam menyongsong pelaksanaannya pada tahun 2001. Melihat potensi tersebut maka sangat relevan pemberdayaan sistem *self assessment* dalam Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga dapat menciptakan kesadaran bagi wajib pajak untuk membayar pajak dengan menentukan sendiri pajak terhutang melalui SPPT PBB yang diterima oleh Wajib Pajak setelah melalui penghitungan pajak PBB-nya sendiri, dengan ketentuan dan dasar adalah mengetahui besarnya NJOP PBB bagi obyek pajaknya masing-masing. Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, maka

melihat ketentuan tersebut diatas maka kalau sistem *self assessment* itu diberdayakan peran aktif dalam menentukan budgeter bagi daerah sangat ditentukan oleh Wajib Pajak. Namun demikian peneliti mengungkapkan kembali Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1985 Pasal 9 ayat (1) dan (2) tentang Tata Cara Pendaftaran Obyek Pajak, dirubah lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 19/KMK.04/1986, dirubah lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 617/KMK.04/1989, kemudian masih dirubah lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan yang terakhir, yaitu Kep-817/KMK.04/1991 yang mana dalam ketentuan pada pengisian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak pada kolom Nomor 23 dimana tertera Zona Nilai Tanah (ZNT) sebagai dasar penentuan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan sebagai dasar penentuan penghitungan Pajak Terhutang, tertera bahwa selain yang diisi oleh petugas (bagian diarsip kolom nomor 23 diisi oleh Wajib Pajak) yang berarti bahwa kolom tersebut dilarang diisi oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu kalau melihat ketentuan tersebut, maka pemberdayaan *self assessment* di Kabupaten Semarang baru sebatas mengisi SPOP tanpa kolom ZNT, mengambil SPOP mengembalikan SPOP yang telah diisi pada tempat yang telah ditentukan oleh fiskus, membayar besarnya Pajak Terhutang sesuai dengan SPPT yang diterima pada BRI unit-unit yang telah ditentukan oleh Kantor Pelayanan PBB (KP-PBB) Kabupaten Semarang.

3.2 Analisa Normatif

Didalam menginventarisasi hukum positif tentang perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan, maka didasarkan pada pedoman ;

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
 - a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1994.
 - b. Peraturan Dasar ;
 - i. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
 - ii. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - a. Peraturan Perundang-undangan :
 - i. Undang-Undang dan peraturan yang setaraf.
 - ii. Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf.
 - iii. Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf.
 - iv. Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf.
 - v. Peraturan-peraturan Daerah.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

Berdasarkan pedoman diatas, maka norma dasar atau kaidah dasar yang digunakan dalam menyusun kebijakan yang berupa peraturan Perundang-undangan. Menurut pembukaan UUD 1945 keberadaan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Norma dasar ini memberikan landasan filosofis bagi seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintahan negara Indonesia melalui penetapan Peraturan Perundang-undangan yang berorientasi memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkeadilan sosial. Sehingga meskipun pajak merupakan hak negara dan kewajiban setiap warga negara, pengutipan pajak harus tetap berasaskan memajukan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkeadilan sosial.

Kewenangan pemerintah selaku eksekutor kekuasaan negara didalam menetapkan dan mengundang peraturan Perundang-undangan pajak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :

Pasal 5 ayat 1 (Amandemen pertama tahun 1999 pasal 5 (1) diubah menjadi :

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 20 ayat 1 (Amandemen pertama tahun 1999 pasal 20 (1) diubah menjadi :

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang

Pasal 23 ayat (2)

- (2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan dan ketetapan pasal-pasal diatas maka dapat dipahami bahwa Presiden selaku pimpinan eksekutif (pemerintah) mempunyai hak mengajukan rancangan Undang-undang tentang perpajakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan demikian meskipun Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang tetapi yang berhak menetapkan suatu Undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut menurut penulis merupakan penjabaran kedaulatan negara berada ditangan rakyat, dimana Dewan Perwakilan Rakyat merupakan wakil rakyat dalam lembaga legislatif untuk melaksanakan kedaulatan sekaligus mengamankan hak-hak milik rakyat. Ketentuan pasal tersebut juga tidak menutup kemungkinan pemegang kekuasaan membentuk Undang-undang membuat rancangan Undang-undang. Sedang dalam pasal 23 ayat (2) merupakan landasan yuridis yang menetapkan segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang.

Secara umum Undang-Undang perpajakan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566). Sedang ketentuan dan ketetapan tentang Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569), yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312).

Dalam penjelasan UU Nomor 12 tahun 1994, ketentuan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku sejak Tahun 1986 merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan.

Pada hakikatnya, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotong royongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaannya harus

memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sisten administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Setelah hampir satu dasawarsa berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, dengan makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya jumlah obyek pajak serta untuk menyelaraskan pengenaan pajak dengan amanat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, dirasakan sudah masanya untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985.

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum dan keadilan, maka arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Menunjang kebijaksanaan pemerintahan menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak;
- b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya.

Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut, maka dalam penyempurnaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 perlu diatur kembali ketentuan-ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan yang dituangkan dalam Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dengan pokok-pokok antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk lebih memberikan keadilan dalam pengenaan pajak, diatur ketentuan mengenai besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak untuk setiap wajib pajak;
- b. Memperjelas ketentuan mengenai upaya banding ke badan peradilan pajak.

Penelitian terhadap ketaatan wajib Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat dilepaskan dari faktor yuridisnya yaitu bagaimana suatu peraturan Perundang-undangan menentukan aturan bagi wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Grindhil hal tersebut berkaitan dengan *variabel content*. Segala sesuatu yang ada dalam kebijakan publik berpengaruh terhadap proses implementasi. Atau menurut Hoefnagels, seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya. Hal mana sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang. Berkaitan dengan ketaatan wajib Pajak Bumi dan Bangunan maka ada beberapa faktor yang harus dipenuhi oleh Undang-Undang yang sesuai dengan obyek serta subyek pajak yang diaturnya. Dalam perubahan pasal 3 UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 3

- 1) Obyek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah obyek pajak yang :
 - a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - c) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - d) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- 2) Obyek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
- 3) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- 4) Penyesuaian besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
3. Ketentuan pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 23

“Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini, berlaku ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566) serta peraturan Perundang-undangan lainnya.”

4. Ketentuan Pasal 27 dihapus.

Pasal II

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, peraturan pelaksanaan yang telah ada dibidang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal III

Undang-Undang ini bisa disebut “Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.”

Pasal IV

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dalam penjelasan pasal demi pasal UU No. 12 tahun 1994 tentang perubahan atas UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, pasal 1, angka 1, pasal 3.

Ayat (1)

Yang tidak dimaksudkan dengan tidak untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa obyek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan.

Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesejahteraan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

Contoh :

- Pesantren atau sejenis dengan itu;
- Madrasah;
- Tanah wakaf;
- Rumah sakit umum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan obyek pajak dalam ayat ini adalah obyek pajak yang dimiliki/dikuasai/digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintah.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan

untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Oleh sebab itu wajar Pemerintah Pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Mengenai bumi dan/atau bangunan milik perorangan dan/atau badan yang digunakan oleh negara, kewajiban perpajakan tergantung pada perjanjian yang diadakan.

Ayat (3)

Untuk setiap wajib pajak diberikan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena pajak sebesar RP. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa obyek pajak, yang diberikan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak hanya salah satu obyek pajak yang nilainya terbesar, sedangkan obyek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak.

Contoh :

1. Seorang wajib pajak hanya mempunyai obyek pajak berupa bumi dengan nilai sebagai berikut :
 - Nilai Jual Obyek Pajak Bumi Rp. 3.000.000,00
 - Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak Rp. 8.000.000,00
 Karena Nilai Jual Obyek pajak berada dibawah Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak, maka obyek pajak tersebut tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Seorang wajib pajak mempunyai dua obyek pajak berupa bumi dan bangunan masing-masing di Desa A dan Desa B dengan nilai sebagi berikut:
 - a. Desa A
 - Nilai Jual Obyek Pajak Bumi = Rp. 8.000.000,00
 - Nilai Jual Obyek Pajak Bangunan = Rp. 5.000.000,00

Nilai Jual Obyek Pajak untuk penghitungan pajak ;

- Nilai Jual Obyek Pajak Bumi Rp. 8.000.000,00
- Nilai Jual Obyek Pajak Bangunan Rp. 5.000.000,00 (+)
- Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Rp. 13.000.000,00
- Nilai Jual Obyek pajak Tidak Kena Pajak Rp. 8.000.000,00 (-)
- Nilai Jual Obyek Pajak untuk penghitungan Pajak Rp. 5.000.000,00

b. Desa B

- Nilai Jual Obyek Pajak Bumi Rp. 5.000.000,00
 - Nilai Jual Obyek Pajak Bangunan Rp. 3.000.000,00
- Nilai Jual Obyek Pajak untuk penghitungan pajak ;
- Nilai Jual Obyek Pajak Bumi Rp. 5.000.000,00
 - Nilai Jual Obyek Pajak Bangunan Rp. 3.000.000,00 (+)
 - Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Rp. 8.000.000,00
 - Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak Rp. 0,00 (-)
 - Nilai Jual Obyek Pajak untuk penghitungan Pajak Rp. 8.000.000,00

Untuk obyek pajak di Desa B, tidak diberikan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), karena Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak telah diberikan untuk obyek pajak yang berada di Desa A.

3. Seorang wajib pajak mempunyai dua obyek pajak berupa bumi dan bangunan pada satu Desa C dengan nilai sebagai berikut :

a. Obyek I

- Nilai Jual Obyek Pajak Bumi Rp. 4.000.000,00
 - Nilai Jual Obyek Pajak Bangunan Rp. 2.000.000,00
- Nilai Jual Obyek Pajak untuk penghitungan pajak ;
- Nilai Jual Obyek Pajak Bumi Rp. 4.000.000,00
 - Nilai Jual Obyek Pajak Bangunan Rp. 2.000.000,00 (+)
 - Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Rp. 6.000.000,00
 - Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak Rp. 8.000.000,00

Karena Nilai Jual Obyek Pajak berada dibawah Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak, maka obyek pajak tersebut dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Obyek II

- Nilai Jual Obyek Pajak Bumi Rp. 4.000.000,00
- Nilai Jual Obyek Pajak Bangunan Rp. 1.000.000,00

Nilai Jual Obyek Pajak untuk penghitungan pajak ;	
- Nilai Jual Obyek Pajak Bumi	Rp. 4.000.000,00
- Nilai Jual Obyek Pajak Bangunan	<u>Rp. 1.000.000,00 (+)</u>
- Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak	Rp. 5.000.000,00
- Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak	<u>Rp. 0,00(-)</u>
- Nilai Jual Obyek Pajak untuk penghitungan Pajak	<u>Rp. 5.000.000,00</u>

Ayat (4)

Berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk mengubah besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga umum obyek pajak setiap tahunnya.

Pasal 1, angka 2

Dengan dihapusnya Pasal 17, ketentuan banding Pajak Bumi dan Bangunan mengikuti ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566) dan UU No. 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua UU No. 6 tahun 1983.

Pasal 1, angka 3, pasal 23

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan lainnya adalah antara lain Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan pajak Negara dengan Surat Paksa.

Dalam setiap keputusan dan/atau penetapan hukum harus mensyaratkan adanya kepastian dan jaminan hukum. Pada penjelasan UU No. 12 Tahun 1994 diatas kepastian hukum dapat dilihat dari adanya penjelasan pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) dimana Menteri Keuangan untuk mengubah besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga umum obyek pajak setiap tahun. Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum bahwa

perkembangan ekonomi atau kondisi kemampuan ekonomi wajib pajak. Dapat menjadi pertimbangan pengurangan hutang Pajak Bumi dan Bangunan.

Dengan dihapusnya Pasal 17, maka keberatan dan banding dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 15

- 1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas :
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;
 - b. Surat Ketetapan Pajak.
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan secara jelas.
- 3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- 4) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan wajib pajak.
- 5) Apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak

- 6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 16

- 1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- 2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
- 3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang.
- 4) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, wajib pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- 5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Dalam prakteknya pengajuan keberatan pada Direktorat Jenderal Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB maupun Surat Ketetapan Pajak yang diajukan secara tertulis dengan menyatakan alasan secara jelas dan surat keberatan dikirim melalui pos tercatat yang dapat menjadi tanda bukti. Jawaban yang diinginkan wajib pajak tidak segera diterima. Meskipun dalam Pasal 16 ayat (5) terdapat ketentuan apabila jangka waktu paling lama 12 bulan sejak

tanggal surat keberatan diterima telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima, tetapi didalam prakteknya wajib pajak tetap menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) jumlahnya sama atau bahkan lebih tinggi dari pajak terhutang yang diajukan keberatan. Dengan adanya kasus-kasus seperti yang diterangkan diatas menyebabkan wajib pajak menunda pembayaran hutang pajaknya tepat pada jatuh tempo. Tentu saja bagi wajib pajak PBB yang bersikap demikian tidak dapat dikatakan atau disebut tidak taat sebagai wajib pajak. Sebab ada ketidakpastian dan tidak adanya jaminan hukum bagi wajib pajak apalagi bila dihubungkan dengan asas *self assessment* dimana wajib pajak dituntut untuk berlaku aktif.

Dengan demikian dari kajian normatif berdasarkan data kualitatif dapat diinterpretasikan bahwa dari sudut normatif masih belum dipenuhinya asas-asas hukum yang mengakomoditil kepentingan masyarakat sebagai wajib pajak. Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang Perubahan UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Juga membebaskan pihak aparatur jika melakukan kelalaian. Hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada aparatur pajak (Direktur Jenderal Pajak) tidak dilengkapi dengan kewajiban yang harus dilaksanakan serta sanksi yang akan diterima apabila melalaikan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Misalnya jawaban Direktur Jenderal Pajak terhadap keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Undang-Undang menetapkan jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal

surat keberatan diterima, tetapi apabila jangka waktu dilampaui, Undang-Undang hanya menetapkan keberatan yang diajukan dianggap diterima. Hal tersebut dapat membuka peluang yang menguntungkan aparaturnya pajak karena tidak adanya sanksi dalam melakukan kelalaian kewajiban-kewajibannya memberikan jawaban kepada wajib pajak sebagai pemenuhan kepastian dan jaminan hukum dibidang perpajakan.

3.3 Ketaatan Wajib Pajak PBB

Untuk menganalisa sampai sejauh mana ketaatan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pemerintah Kabupaten Semarang, maka penulis melakukan penelitian di tiga desa yaitu Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Ungaran, dan Kelurahan Gedang Anak Kabupaten Semarang. Menilai ketaatan wajib pajak bukan pekerjaan yang gampang, diperlukan adanya beberapa kriteria sebagai batasan pemahaman sekaligus merupakan indikator ketaatan wajib pajak. Dalam penelitian ini digunakan 56 responden sebagai sumber data. 56 responden tersebut tersebar di tiga kelurahan yang dipilih sebagai lokasi penelitian.

Ketaatan Wajib Pajak PBB diteliti berdasarkan beberapa indikator yang mempengaruhi tingkah laku maupun sikap responden. Indikator tersebut yaitu

- 1) Petugas penarik pajak datang ke rumah.
- 2) Takut terhadap sanksi.
- 3) Kesadaran WP
- 4) Kemampuan ekonomi WP

Empat (4) kriteria diatas kemudian diuraikan menjadi beberapa pertanyaan dan diajukan kepada responden. Bentuk pertanyaan yang diajukan pada responden disertai dengan tiga alternatif jawaban yang dapat dipilih dengan bebas oleh responden.

Dari hasil penelitian, maka jawaban responden dapat disusun sebagaimana dilagakan dalam tabel-tabel di bawah ini. Dalam Tabel III.1 dari 56 responden yang bukan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 1,78 %, sedang 98,21 % responden merupakan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat diprediksikan untuk menilai ketaatan Wajib pajak dengan menggunakan sumber data 56 responden cukup mempunyai validitas yang tinggi atau dapat dipercaya. Mengingat responden merupakan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Jumlah sampel atau responden 56 orang berarti diatas uji normalitas, karena sampel dinilai cukup besar. Dari data tersebut dapat disimpulkan validitas dan reliabilitas sumber data dapat dipercaya. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini ;

Tabel III.1

Responden Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	55	98,21
2	Ragu-ragu	0	0
3	Tidak	1	1,78
Jumlah		56	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 1

Dalam tabel di bawah ini dapat diketahui Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang taat berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan apakah saudara Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang taat.

Tabel III.2

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Yang Taat

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	52	92,85
2	Ragu-ragu	2	3,57
3	Tidak	2	3,57
Jumlah		56	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 2

Tabel III.2 menunjukan 92,85 % responden mengaku sebagai Wajib Pajak yang taat, 3,57 % responden menyatakan ragu-ragu dan 3,57 % responden tidak sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang taat. Tabel ini juga memperkuat pernyataan responden dalam menghitung validitas dan reliabilitas data yang diteliti. Hasil jawaban responden dalam tabel ini akan dikonfirmasi atau dikonfirmasi dengan jawaban responden pada tabel-

tabel berikutnya sehingga dapat disimpulkan tingkat kesesuaian ketaatan Wajib Pajak.

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara tepat waktu merupakan indikator adanya ketaatan Wajib Pajak didalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban mereka dalam membayar pajak. Hasil penelitian yang merupakan jawaban responden terhadap pertanyaan “Apakah saudara selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu sesuai dengan jatuh tempo yang tertera dalam SPPT?”, maka diperoleh jawaban responden seperti tabel di bawah ini.

Tabel III.3
Pajak Bumi dan Bangunan Tepat Waktu

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	48	85,71
2	Ragu-ragu	1	1,78
3	Tidak	7	12,5
Jumlah		56	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 3

Tabel III.3 menyajikan data 85,71 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu, 1,78 % menyatakan ragu-ragu dan 12,5 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak tepat waktu. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ketaatan wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 85,71 % yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara tepat waktu.

Bukti ketaatan Wajib Pajak di dalam melaksanakan kewajiban tidak jarang diwujudkan dengan sikap yang berlebihan misalnya dalam penelitian ini

ada indikasi ketaatan Wajib Pajak diwujudkan dengan membayar pajak PBB lebih awal. Hal tersebut sebagai mana dilagakan dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.4
Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Lebih Awal

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	31	55,35
2	Ragu-ragu	0	0
3	Tidak	25	44,64
Jumlah		56	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 4

Dari Tabel III.4 menyajikan data 55,35 % menyatakan membayar PBB lebih awal, 0 % menyatakan ragu-ragu, dan 44,64 % menyatakan membayar PBB tidak lebih awal. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diprediksikan 55,35 % Wajib Pajak melakukan pembayaran lebih awal dari jatuh tempo yang tertera dalam SPPT. Hal ini menunjukkan adanya tingkat ketaatan Wajib Pajak yang cukup tinggi lebih dari 50 % yang berarti akan menguntungkan Pemerintah Daerah. Nampaknya tingkat kesadaran penduduk sebagai Wajib Pajak PBB di Kabupaten Semarang sudah cukup baik dan partisipasi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan mengkonfrontasikan jawaban responden dalam Tabel III.4 dengan jawaban Tabel III.5 seperti di bawah ini.

Tabel III.5

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Terlambat

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	4	7,14
2	Ragu-ragu	1	1,78
3	Tidak	51	91,07
Jumlah		56	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 5

Tabel III.5 menyajikan data 7,14 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan terlambat, 1,78 % menyatakan ragu-ragu dan 91,07 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ketaatan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 91,07 % yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara tepat waktu

Tabel III.6

Pajak Bumi dan Bangunan Lebih Awal, Tepat, Kadang-Kadang Terlambat

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	34	60,71
2	Ragu-ragu	3	5,35
3	Tidak	19	33,92
Jumlah		56	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 6

Tabel III.6 menyajikan data 60,71 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan lebih awal atau tepat waktu, 5,35 % menyatakan ragu-ragu dan 33,92 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan kadang-kadang terlambat atau tidak tepat waktu. Dari tabel di atas

dapat disimpulkan bahwa ketaatan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 60,71 % yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan lebih awal atau tepat waktu.

Tabel III.7

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum Jatuh Tempo

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	26	46,42
2	Ragu-ragu	2	3,57
3	Tidak	28	50
Jumlah		56	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 7

Tabel III.7 menyajikan data 46,42 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebelum jatuh tempo, 3,57 % menyatakan ragu-ragu dan 50 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan setelah jatuh tempo. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ketaatan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 46,42 % yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebelum jatuh tempo.

Tabel III.8

Sebab Petugas Penarik Datang Ke Rumah

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	3	5,35
2	Ragu-ragu	2	3,57
3	Tidak	51	91,07
Jumlah		56	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 8

Tabel III.8 menyajikan data 5,35 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebab petugas penarik datang ke rumah, 3,57 % menyatakan ragu-ragu dan 91,07 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebab petugas penarik tidak datang ke rumah. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ketaatan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 91,07 % yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bukan karena petugas penarik datang ke rumah.

Tabel III.9

Sebab Murahnya Pajak Terhutang

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	4	7,14
2	Ragu-ragu	2	3,57
3	Tidak	50	89,28
Jumlah		56	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 9

Tabel III.9 menyajikan data 7,14 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebab murahnya pajak terhutang, 3,57 % menyatakan ragu-ragu dan 89,28 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebab mahalny pajak terhutang. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ketaatan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 89,28 % yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bukan karena murahny pajak terhutang.

Tabel III.10

Pembayar PBB Sebelum Jatuh Tempo

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	49	87,5
2	Ragu-ragu	1	1,78
3	Tidak	6	10,71
Jumlah		56	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 10

Tabel III.10 menyajikan data 87,5 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan itu penting bagi negara, 1,78 % menyatakan ragu-ragu dan 10,71 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan itu tidak penting bagi negara. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ketaatan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 87,5 % yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan itu penting bagi negara.

Tabel III.11

Takut Ada Sanksi Pidananya

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	11	19,64
2	Ragu-ragu	3	5,35
3	Tidak	42	75
Jumlah		56	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 11

Tabel III.11 menyajikan data 19,64 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan takut ada sanksi pidananya, 5,35 % menyatakan ragu-ragu dan 75 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan

Bangunan tidak takut ada sanksi pidananya. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ketaatan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 75 % yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bukan karena ada sanksi pidananya.

Tabel III.12
Memang Suatu Kewajiban

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	54	96,42
2	Ragu-ragu	1	1,78
3	Tidak	1	1,78
Jumlah		56	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 12

Tabel III.12 menyajikan data 96,42 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan suatu kewajiban, 1,78 % menyatakan ragu-ragu dan 1,78 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak suatu kewajiban. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ketaatan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 96,42 % yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan karena merasa sebagai kewajiban.

Tabel III.13
Alasan Wajib Pajak Tepat Waktu, Karena Penarik Datang Ke Rumah

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	5	8,92
2	Ragu-ragu	1	1,78
3	Tidak	50	89,28
Jumlah		56	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 13

Tabel III.13 menyajikan data 8,92 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan alasan wajib pajak tepat waktu, karena penarik datang kerumah, 1,78 % menyatakan ragu-ragu dan 89,28 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu, bukan karena penarik datang kerumah. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ketaatan wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 89,28 % yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu, bukan karena penarik datang ke rumah.

Tabel III.14
Pajak Terutang Itu Murah

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	6	10,71
2	Ragu-ragu	4	7,14
3	Tidak	46	82,14
Jumlah		56	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 14

Tabel III.14 menyajikan data 10,71 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan itu murah, 1,78 % menyatakan ragu-ragu dan 82,14 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan itu tidak murah. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ketaatan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 82,14 % yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat, bukan karena murah.

Tabel III.15

Membayar PBB Karena Penting Bagi Negara

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	54	96,42
2	Ragu-ragu	0	0
3	Tidak	2	3,57
Jumlah		56	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 15

Tabel III.15 menyajikan data 96,42 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan itu penting bagi negara, 0 % menyatakan ragu-ragu dan 3,57 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak penting bagi negara. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ketaatan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 96,42 % yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang beranggapan pajak itu penting bagi negara.

Tabel III.16

Takut Ada Sanksi Pidana

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	14	25
2	Ragu-ragu	2	3,57
3	Tidak	40	71,42
Jumlah		56	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 16

Tabel III.16 menyajikan data 25 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan takut ada sanksi pidana, 3,57 % menyatakan ragu-ragu dan 71,42 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak takut

ada sanksi pidananya. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ketaatan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 71,42 % yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bukan karena takut ada sanksi pidananya.

Tabel III.17
Sebab Terlambat Karena Lupa

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	28	50
2	Ragu-ragu	2	3,57
3	Tidak	26	46,42
Jumlah		56	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 17

Tabel III.17 menyajikan data 50 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan terlambat karena lupa, 3,57 % menyatakan ragu-ragu dan 46,42 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan terlambat karena lupa. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa keterlambatan wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 50 % yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan karena lupa.

Tabel III.18
Tidak Sesuai Dengan Kewajiban Pajak

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	8	14,28
2	Ragu-ragu	3	5,35
3	Tidak	45	80,35
Jumlah		56	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 18

Tabel III.18 menyajikan data 14,28 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak sesuai dengan kewajiban pajak, 1,78 % menyatakan ragu-ragu dan 80,35 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan kewajiban pajak. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ketaatan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 80,35 % yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang beranggapan sesuai dengan kewajiban pajak.

Tabel III.19

Petugas Penarik Tidak Datang Ke Rumah

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	5	8,92
2	Ragu-ragu	1	1,78
3	Tidak	50	89,28
Jumlah		56	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 19

Tabel III.19 menyajikan data 8,92 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena petugas penarik tidak datang ke rumah, 1,78 % menyatakan ragu-ragu dan 89,28 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena petugas penarik tidak datang ke rumah. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ketaatan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 89,28 % yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan karena petugas penarik tidak datang kerumah.

Tabel III.20

Tidak Mencerminkan Keadilan

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	5	8,92
2	Ragu-ragu	6	10,71
3	Tidak	45	80,35
Jumlah		56	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 20

Tabel III.20 menyajikan data 8,92 % responden menyatakan terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena tidak mencerminkan keadilan, 10,71 % menyatakan ragu-ragu dan 80,35 % menyatakan terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena tidak mencerminkan keadilan. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa keterlambatan wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 80,35 % yang tidak didasarkan pada alasan bahwa PBB tidak mencerminkan keadilan.

Tabel III.21

Alasan Terlambat, Karena Yakin Sanksi Pidanya Tidak Akan Dilaksanakan

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	21	37,5
2	Ragu-ragu	5	8,92
3	Tidak	30	53,57
Jumlah		56	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 21

Tabel III.21 menyajikan data 37,5 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan terlambat, karena yakin sanksi pidanya tidak akan dilaksanakan, 8,92 % menyatakan ragu-ragu dan 53,57 %

menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan terlambat, karena tidak yakin sanksi pidananya tidak akan dilaksanakan. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa keterlambatan wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 53,57 % merasa yakin bahwa sanksi pidana keterlambatan pajak akan dilaksanakan. Oleh karena itu keterlambatan membayar PBB bukan disebabkan oleh tidak dilaksanakannya sanksi pidana, tetapi disebabkan oleh hal-hal yang lain.

Tabel III.22
Keterlibatan Masyarakat

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	2	3,57
2	Ragu-ragu	3	5,35
3	Tidak	51	91,07
Jumlah		56	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 22

Tabel III.22 menyajikan data 3,57 % responden menyatakan hutang Pajak Bumi dan Bangunan dihitung dengan melibatkan masyarakat, 5,35 % menyatakan ragu-ragu dan 91,07 % menyatakan hutang Pajak Bumi dan Bangunan dihitung tidak dengan melibatkan masyarakat. Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata 91,07 % responden merasa tidak dilibatkan dalam penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan. Tentu saja hal ini bertentangan pemberdayaan asas *self assessment* dalam pengenaan PBB.

Tabel III.23
Pemahaman Masyarakat

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	20	35,71
2	Ragu-ragu	2	3,57
3	Tidak	34	60,71
Jumlah		56	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 23

Tabel III.23 menyajikan data 35,71 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena pemahaman masyarakat, 3,57 % menyatakan ragu-ragu dan 60,71 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena kurang pemahaman masyarakat. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa 60,71 % responden tidak memahami elemen-elemen obyek Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga ketaatan Wajib Pajak didalam memenuhi kewajibannya hanya didasarkan atas kesadaran sebagai warga negara didalam memenuhi kewajiban, bukan karena kekritisian masyarakat terhadap berbagai elemen PBB.

Tabel III.24
Pengajuan Permohonan

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	8	14,28
2	Ragu-ragu	1	1,78
3	Tidak	47	83,92
Jumlah		56	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 24

Tabel III.24 menyajikan data 14,28 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena pengajuan permohonan, 1,78 % menyatakan ragu-ragu dan 83,92 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena tidak mengajukan permohonan. Data di atas menunjuk adanya Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan hutang pajak sebesar 14,28 %. Pengajuan permohonan pengurangan hutang pajak dapat disebabkan oleh berbagai hal baik yang berkaitan dengan kondisi ekonomi Wajib Pajak maupun piutang Pajak yang dihitung tidak sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak. Dari 14,28 % responden yang mengajukan permohonan pengurangan pajak maka, dalam tabel di bawah ini akan disebutkan data permohonan masyarakat yang dikabulkan.

Tabel III.25
Permohonan Dikabulkan

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	6	10,71
2	Ragu-ragu	15	26,78
3	Tidak	35	62,5
Jumlah		56	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 25

Tabel III.25 menyajikan data 10,71 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena permohonan dikabulkan, 26,78 % menyatakan ragu-ragu dan 62,5 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena permohonan tidak dikabulkan. Tabel di atas menunjukan hanya sebesar 10,71 % permohonan pengurangan dan/atau

peninjauan/perhitungan kembali hutang pajak yang yang dikabulkan oleh pemerintah.

3.4 Analisis Data

Dari hasil penelitian (jawaban responden) yang diragakan dari Tabel III.1 sampai III.25 dapat disimpulkan tingkat ketaatan Wajib Pajak PBB di Kabupaten Semarang dapat dikatakan cukup tinggi 92,85 % (lihat Tabel III.2). Pembayaran hutang Pajak Bumi dan Bangunan melebihi jatuh tempo (terlambat) lihat Tabel III.5, bahkan ada 46,42 % Wajib Pajak yang membayar sebelum jatuh tempo (lihat Tabel III.7).

Apakah nilai ketaatan Wajib Pajak PBB disebabkan karena adanya sanksi pidana atau adanya petugas penarik yang datang ke rumah Wajib Pajak ? Dari hasil Penilaian dapat dibuktikan bahwa ketaatan Wajib Pajak PBB tidak didorong karena petugas penarik datang ke rumah, hal tersebut dapat diketahui dari pernyataan 91,07 % Wajib Pajak membayar PBB tidak disebabkan adanya petugas penarik yang datang ke rumah (lihat Tabel III.8). Demikian juga adanya sanksi pidana yang mendorong wajib pajak membayar PBB hanya diakui 19,54 % mengakui takut adanya sanksi pidana sedang 80,36 % menyatakan tidak terpengaruh adanya sanksi pidana (lihat Tabel III.11). Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara dengan status Wajib Pajak yang menumbuhkan kesadaran diakui oleh 96,42 % (lihat Tabel III.12). Dengan

demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa ketaatan Wajib Pajak PBB banyak didorong tingkat kepatuhan masyarakat sebagai warga negara dan Wajib Pajak.

Realisasi penerimaan PBB dan BPHTB Tahun 1999-2000 menurut data yang didapat dikantor pelayanan PBB Ungaran dapat juga digunakan untuk mengetahui ketaatan Wajib Pajak PBB. Adapun data realisasi penerimaan PBB dan BPHTB Tahun 1999-2000 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel III.26

Realisasi Penerimaan PBB dan BPHTB Tahun 1999/2000

Kantor Pelayanan PBB Ungaran

Minggu Ke.II (Kedua) Bulan : Januari Tahun 2000

Periode Realisasi PBB Tgl. 10 S.D 14 Januari 2000

Periode BPHTB : Tgl. 6 S.D 12 Januari 2000

SEKTOR	RENCANA PENERIMAAN 1998/1999	REALISASI PENERIMAAN				%
		S.D BULAN LALU	BULAN INI		S.D BULAN INI	
			MINGGU INI	S.D MINGGU INI		
1	2	3	4	5	6	7
Pedesaan	1.205.000.000	1.357.458.244	40.293.636	40.419.995	1.397.878.239	116,01
Perkotaan	1.831.000.000	2.080.390.298	8.188.771	11.397.331	2.091.787.629	114,24
Des + Pkt	3.036.000.000	3.437.848.542	48.482.407	51.817.326	3.489.665.868	114,94
Perkebunan	645.000.000	870.946.184	—	3.442.501	874.388.685	135,56
Perhutani	120.000.000	231.228.660	—	—	231.228.660	192,69
Pertambangan	1.344.042.000	1.768.463.268	—	—	1.768.463.268	131,58
APBN	5.145.042.000	6.308.486.654	48.482.407	55.259.827	6.363.746.481	123,69
BPHTB	428.000.000	398.960.124	54.071.225	63.010.437	461.970.561	107,94

Sumber data : Kantor Pelayanan PBB Ungaran

Dari Tabel III.26 dapat dilihat bahwa penerimaan PBB di Kabupaten Semarang selalu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini dapat disimpulkan karena adanya tingkat ketaatan Wajib Pajak. Ketaatan penduduk

atau Wajib Pajak untuk tingkat pedesaan ternyata lebih tinggi dari penduduk perkotaan. Hal tersebut dapat dilihat dari data penerimaan PBB pedesaan dalam tabel di atas penerimaannya mencapai 116,01 %, sedang untuk wilayah perkotaan terealisasi sebesar 114, 24 %. Untuk pedesaan juga terealisasi 114, 94 % pada Tahun 1999 samapai dengan tanggal 12 Januari 2000.

Untuk mengetahui dan memperbandingkan tingkat ketaatan wajib pajak PBB antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan di Kabupaten Semarang, maka dikumpulkan data dari 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Ungaran yang termasuk wilayah perkotaan, Kelurahan Sidomulyo yang termasuk wilayah pedesaan, dan Kelurahan Gedanganak yang termasuk wilayah pengembangan di Kabupaten Semarang. Hasil penelitian dapat dilihat sebagaimana diragakan dalam tabel-tabel di bawah ini.

Tabel III.27
Realisasi Penerimaan PBB
Di Kelurahan Ungaran
Tahun 1999 – 2002

TAHUN	JUMLAH WAJIB PAJAK	TARGET	REALISASI
1999	3.027	103.207.623	83.022.927
2000	3.043	135.545.433	108.436.250
2001	3.082	125.892.018	104.487.809
2002	30.133	173.840.310	123.362.561

Sumber data : Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran, Kabupaten
Semarang

UPT-PUSTAK-UNDIP

Dari Tabel III.27 dapat diketahui bahwa target penerimaan PBB masih belum sama dengan realisasi penerimaan PBB. Pada Tahun 1999 dengan jumlah Wajib Pajak 3.027 target penerimaan hutang pajak 103.207.623. Sedang realisasi penerimaan pajak besar 83.022.927. Jadi hanya terealisasi antara 80 %. Demikian pula penerimaan hutang pajak PBB pada tahun 2000, 2001, dan 2002 masih di bawah target, rata-rata hanya mencapai 80 % dari target.

Tabel III.28
Realisasi Penerimaan PBB
Di Kelurahan Sidomulyo
Tahun 1999 – 2002

TAHUN	JUMLAH WAJIB PAJAK	TARGET	REALISASI
1999	1.028	28.831.285	19.601.735
2000	1.041	42.752.457	27.059.228
2001	1.093	46.208.985	33.916.697
2002	1.108	56.858.381	35.755.756

Sumber data : Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten

Semarang

Tabel III.28 tidak jauh berbeda yang telah dikemukakan untuk Kelurahan Ungaran. Dalam Tahun 1999 jumlah Wajib Pajak 1.028 dan target 218.084.285 hanya terealisasi 19.601.738 atau hanya terealisasi 70 %. Demikian pula untuk Tahun berikutnya yaitu Tahun 2000, 2001, dan 2002 mengalami penurunan atau tidak terpenuhinya target hutang pajak.

Tabel III.29
Realisasi Penerimaan PBB
Di Kelurahan Gedanganak
Tahun 1999 – 2002

TAHUN	JUMLAH WAJIB PAJAK	TARGET	REALISASI
1999	3.374	218.084.533	187.256.209
2000	3.380	280.116.451	243.158.742
2001	3.416	435.187.023	402.987.849
2002	3.664	536.247.452	463.037.977

Sumber data : Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran,
Kabupaten Semarang

Pada Tahun 1999 dengan jumlah Wajib Pajak 3.374 hutang pajak ditarget 218.084.533 yang terealisasi hanya 187.256.209 atau terealisasi sekitar 85,7 %. Demikian pula untuk Tahun 2000, 2001, dan 2002 hutang pajak yang ditargetkan realisasinya belum mencapai 100 %.

Berdasarkan ketiga tabel di atas, maka ada beberapa kesimpulan yaitu :

1. Belum akuratnya data Wajib Pajak yang dimiliki oleh kelurahan yang digunakan untuk menghitung target hutang pajak.
2. Ada kemungkinan terjadinya salah penghitungan besar piutang pajak antara wajib pajak dengan aparaturnya.
3. Belum dilaksanakannya aturan pajak PBB secara optimal.

Hal yang menarik dari ketiga data di atas mengenai pertambahan jumlah wajib pajak penambahan terbesar terjadi pada kelurahan perkotaan

maupun kelurahan daerah pengembangan (Kelurahan Gedanganak). Pada Kelurahan Gedanganak terdapat penambahan wajib pajak yang signifikan dengan target atau realisasi pendapatan hutang pajak PBB. Masalah tidak terpenuhinya target pengutipan pajak PBB harus dilihat dari metode cara atau tindakan aparat perpajakan daerah di dalam melakukan pemungutan dan pengelolaan pajak

Pajak daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi yang cukup besar sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.30
Penerimaan PBB dan BPHTB
Kabupaten Semarang
Tahun 2002

Pedesaan	2.326.290.571
Perkotaan	4.124.560.734
Perkebunan	662.996.281
Perhutani	105.626.664
Pertambangan	2.399.661.240
APBN	9.619.135.490
BPHTB	1.086.208.264

Dari Tabel III.30 terlihat kontribusi PBB sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutani, dan pertambangan terhadap APBN cukup besar yaitu 9.619.135.490. Mengingat pelaksanaan otonomi daerah di sandarkan pada Pendapatan Asli Daerah yang antara lain pada pajak daerah dan retribusi daerah

maupun pembagian persentasi Pajak Bumi dan Bangunan yang diatur dengan UU No. 12 tahun 1985, jjs UU No. 12 tahun 1994, PP No. 47 tahun 1985, UU No. 22 Tahun 1999 dan UU. No. 25 Tahun 1999 menetapkan sebagai berikut :

- 1) Dana perimbangan terdiri dari :
 - a. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam;
 - b. Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana Alokasi Khusus.
- 2) Penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbalan 10 % (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90 % (sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah.
- 3) Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi dengan imbalan 20 % (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80 % (delapan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah.
- 4) 10 % (sepuluh persen) penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan 20 % (dua puluh persen) penerimaan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan yang menjadi bagian dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota.
- 5) Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20 %

(dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80 (delapan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah.

- 6) Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbalan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini.

Dengan adanya perundang-undangan maka jelas Pemerintah Daerah sebagai penerima persentase terbesar hasil pengutipan pajak PBB harus dapat memanfaatkan secara optimal agar fungsi pajak sebagai budgeter membiayai Pemerintahan Daerah dan regulasi melaksanakan pembangunan Pemerintah Daerah dapat dicapai sebagai bukti pelaksanaan otonomi daerah.

Dari hasil penelitian dapat diketahui masih belum optimalnya aparatur perpajakan daerah di dalam mengutip PBB, di setiap kelurahan diperlukan adanya sosialisasi terutama dalam mengimplementasikan asas-asas *self assessment*. Ketaatan masyarakat terhadap kewajiban wajib pajak PBB sudah cukup dapat diandalkan tinggal pada aparatur dapat atau tidak melaksanakan tugasnya. Tabel di bawah ini dapat dijadikan bukti belum efektif atau optimalnya aparat perpajakan daerah didalam melaksanakan tugasnya.

Tabel III.31
Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Kabupaten Semarang
Tahun 1999 – 2002

Jumlah	Kelurahan Ungaran				Kelurahan Sidomulyo				Kelurahan Gedanganak				Ket
	1999	2000	2001	2002	1999	2000	2001	2002	1999	2000	2001	2002	
Pajak Bumi dan Bangunan	3.627	3.943	3.982	36.133	1.028	1.041	1.093	1.108	3.374	3.389	3.416	3.664	
Pajak	103.207.623	135.545.433	125.892.018	173.840.310	28.531.285	42.752.457	46.208.985	56.858.381	218.084.533	280.116.431	435.187.023	536.247.452	
Saluran	83.022.927	108.146.250	104.487.899	123.362.561	19.601.735	27.039.228	33.916.697	35.755.756	187.256.209	243.158.742	402.987.849	463.037.977	
Pembayaran tepat waktu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Penghasilan pengurangan pajak	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Saluran - Pengurangan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Saluran Tunggakan	19.380.234	26.668.895	31.205.178	50.018.855	9.100.766	15.615.885	14.418.669	21.675.063	30.701.718	36.957.709	39.438.395	92.690.051	Sisa dari tahun-tahun sebelumnya

Sumber data : Kabupaten Semarang

Dilihat dari Tabel III.31 nampak sekali disetiap kelurahan terjadi penunggakan pembayaran PBB. Anehnya tunggakan tersebut semakin tahun tidak berkurang tetapi malah bertambah. Sehingga dapat diprediksikan kurangnya aparatur kelurahan maupun aparatur pajak daerah melakukan pendekatan kepada wajib pajak.

Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui tingkat ketaatan wajib pajak dan ketidaktaatan wajib pajak dari besar tunggakan PBB yaitu :

1. Kelurahan Ungaran

$$1999 = \frac{19.380.234}{103.207.623} \times 100 \% = 18 \%$$

$$2000 = \frac{26.668.895}{135.545.433} \times 100 \% = 19 \%$$

$$2001 = \frac{31.205.178}{125.892.018} \times 100 \% = 24 \%$$

$$2002 = \frac{50.018.855}{173.840.310} \times 100 \% = 28 \%$$

$$\text{Rata-rata} = 22,25 \%$$

2. Kelurahan Sidomulyo

$$1999 = \frac{9.100.766}{28.831.285} \times 100 \% = 31 \%$$

$$2000 = \frac{15.615.885}{42.752.457} \times 100 \% = 36 \%$$

$$2001 = \frac{14.418.669}{46.208.985} \times 100 \% = 31 \%$$

$$2002 = \frac{21.675.063}{56.858.381} \times 100 \% = 38 \%$$

$$\text{Rata-rata} = 34 \%$$

3. Kelurahan Gedanganak

$$1999 = \frac{30.701.718}{218.084.533} \times 100 \% = 14 \%$$

$$2000 = \frac{36.957.709}{280.116.451} \times 100 \% = 13 \%$$

$$2001 = \frac{39.438.395}{435.187.023} \times 100 \% = 9 \%$$

$$2002 = \frac{92.690.051}{536.247.452} \times 100 \% = 17\%$$

$$\text{Rata-rata} = 13.25$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka dapat disusun jumlah wajib pajak yang tidak taat dimasing-masing kelurahan untuk Tahun 1999 sampai Tahun 2002 sebagai berikut :

1) Kelurahan Ungaran

1999	: 3.027 x 18 %	= 544,86 wajib pajak
2000	: 3.043 x 19 %	= 578,17 wajib pajak
2001	: 3.082 x 24 %	= 739,68 wajib pajak
2002	: 30.133 x 28 %	= 8.437,24 wajib pajak

2) Kelurahan Sidomulyo

1999	: 1.028 x 31 %	= 318,68 wajib pajak
2000	: 1.041 x 36 %	= 374,76 wajib pajak
2001	: 1.093 x 31 %	= 338,83 wajib pajak
2002	: 1.108 x 38 %	= 421,04 wajib pajak

3) Kelurahan Gedanganak

1999	: 3.374 x 14 %	= 472,36 wajib pajak
2000	: 3.380 x 13 %	= 439,4 wajib pajak
2001	: 3.416 x 9 %	= 307,44 wajib pajak
2002	: 3.664 x 17 %	= 622,88 wajib pajak

Untuk menganalisa secara domain (wilayah/lokasi yang diteliti), maka dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni :

1. Memberi skor jawaban responden untuk menentukan bobot/nilai jawaban responden dan keterkaitan antara jawaban yang satu dengan jawaban lainnya. Dalam pemberian skor data hasil penelitian ditentukan sebagai berikut.
 - Jawaban ya skor/nilai 3
 - Jawaban ragu-ragu skor/nilai 2
 - Jawaban tidak skor/nilai 1
2. Memperbandingkan antara target realisasi dan tunggakan hutang PBB untuk menilai ketaatan.

Tabel III.2 jawaban responden yang menyatakan taat dikomfirmasikan dengan jawaban yang relevan dalam tabel-tabel lain.

Tabel III.32
Bobot Ketaatan Wajib Pajak

Ya	Ragu-ragu	Tidak	Bobot
52	2	2	162

Sumber : pertanyaan No. 2 yang diolah (lihat Tabel III.2)

Ketaatan wajib Pajak Bumi dan Bangunan keterkaitannya dengan pembayaran PBB sesuai tahun fiscus/fiskal.

Tabel III.33

Bobot Membayar PBB Tepat Waktu

Ya	Ragu-ragu	Tidak	Bobot
48	1	7	153

Sumber : pertanyaan No. 3 yang diolah (lihat Tabel III.3)

Jadi ketaatan wajib Pajak Bumi dan Bangunan dengan pembayaran PBB tepat waktu adalah

$$\frac{153}{162} \times 100 \% = 94,45 \%$$

Hasil perhitungan di atas dapat diprediksikan bahwa ketaatan wajib pajak PBB dibuktikan dengan pembayaran PBB tepat waktu (94,45 %).

Tabel III.34

Bobot Membayar PBB Lebih Awal

Ya	Ragu-ragu	Tidak	Bobot
31	0	25	118

Sumber : pertanyaan No. 4 yang diolah (lihat Tabel III.4)

Sehingga dapat dihitung prosentase keterkaitan ketaatan wajib pajak dengan pembayaran PBB lebih awal sebesar

$$\frac{118}{162} \times 100 \% = 72,83 \%$$

Tabel III.35

Bobot Pembayaran Pajak Sebelum Jatuh Tempo

Ya	Ragu-ragu	Tidak	Bobot
26	2	28	110

Sumber : pertanyaan No.7 yang diolah (lihat Tabel III.7)

Keterkaitan ketaatan wajib pajak dengan membayar PBB sebelum jatuh tempo adalah

$$\frac{110}{162} \times 100 \% = 67,90 \%$$

Dari data diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa wajib pajak PBB dapat dinyakini ketaatannya setelah dihitung dengan keterkaitan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Demikian juga dalam menganalisa presentase wajib pajak secara domain yang menyajikan permohonan peninjauan kembali dan/atau pengurangan hutang pajak.

Tabel III.36

Bobot Pengajuan Permohonan

Ya	Ragu-ragu	Tidak	Bobot
8	1	47	73

Sumber : pertanyaan No. 24 yang diolah (lihat Tabel III.24)

Dasar pengajuan permohonan disebabkan oleh pajak terhutang tidak sesuai dengan kewajiban dan kemampuan ekonomi wajib pajak.

Tabel III.37

Bobot Ketidak Sesuaian Dengan Kewajiban Pajak

Ya	Ragu-ragu	Tidak	Bobot
8	3	45	75

Sumber : pertanyaan No. 18 yang diolah (lihat Tabel III.18)

Sehingga dapat dihitung keterkaitan pengajuan permohonan dengan kemampuan wajib pajak

$$\frac{75}{73} \times 100 \% = 102,73 \%$$

Hasil ini menunjukkan adanya keterkaitan antara kemampuan wajib pajak yang sangat besar. Sedang pengajuan permohonan dikaitkan dengan ketidakpuasan wajib pajak yang merasa tidak adil dapat dilihat dibawah ini.

Tabel III.38

Bobot Tidak Mencerminkan Keadilan

Ya	Ragu-ragu	Tidak	Bobot
5	6	45	72

Sumber : pertanyaan No. 20 yang diolah (lihat Tabel III.20)

Sehingga dapat dihitung keterkaitannya sebesar

$$\frac{72}{73} \times 100 \% = 98,63 \%$$

Jadi dapat diprediksi bahwa pengajuan permohonan mempunyai keterkaitan dengan rasa tidak adil.

Prosentase wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang terlambat dapat dihitung keterkaitannya dengan alasan yang lain sebagai berikut

Tabel III.39

Bobot Membayar PBB Terlambat

Ya	Ragu-ragu	Tidak	Bobot
4	1	51	65

Sumber : pertanyaan No. 5 yang diolah (lihat Tabel III.5)

Keterkaitan pembayaran PBB dengan taktik lupa/lalai dilihat dibawah ini

Tabel III.40

Bobot Sebab Terlambat Karena Lupa

Ya	Ragu-ragu	Tidak	Bobot
28	2	26	114

Sumber : pertanyaan No. 17 yang diolah (lihat Tabel III.17)

Nilai keterkaitan

$$\frac{114}{65} \times 100 \% = 175,38 \%$$

Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa faktor kelalaian/lupa sangat besar. Sedang keterlambatan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak

$$\frac{75}{65} \times 100 \% = 115 \%$$

keterlambatan wajib pajak dengan perasaan tidak adil

$$\frac{72}{73} \times 100 \% = 98,63 \%$$

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa keterlambatan wajib pajak membayar PBB karena lupa, penurunan ekonomi dan merasa tidak adil cukup besar.

Dua tabel di bawah ini dimaksudkan untuk memeragakan sampai sejauh mana peranan PBB didalam pendapatan asli daerah Kabupaten Semarang.

Tabel III.41
Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Semarang
Tahun 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003

TAHUN	TARGET	REALISASI
1999/2000	11.304.489.000	12.069.291.809
2000/2001	9.017.352.000	11.002.410.729
2001/2002	17.042.497.500	18.344.817.318
2002/2003	29.212.284.000	20.289.828.707

Dalam Tabel III.41 diragakan data realisasi pendapatan asli daerah yang rata-rata lebih besar dari target yang ditetapkan. Hanya pada Tahun berjalan 2002/2003 realisasi Pendapatan Asli Daerah baru mencapai 20.289.828.707. Sedang jumlah nominal hasil pungutan PBB Kabupaten Semarang dari Tahun 1999 sampai 2002 tersaji dalam data dibawah ini.

Tabel III.42
Jumlah Nominal Hasil Pungutan PBB
Kabupaten Semarang
Tahun 1999 – 2002

TAHUN	TARGET	REALISASI
1999	4.243.150.000	5.725.062.391
2000	4.087.000.000	6.601.479.824
2001	7.753.882.000	8.101.722.250
2002	8.499.366.000	6.818.284.567

Dari Tabel III.42 juga menunjukan secara keseluruhan realisasi penerimaan PBB dari Tahun 1999 sampai 2002 mengalami kenaikan yang signifikan. Secara administratif Kabupaten Semarang terbagi dalam 15 Kecamatan dan terdiri dari 235 desa/kelurahan. Luas Kabupaten Semarang 95.020,67 Ha atau sekitar 2,92 % dari luas Propinsi Jawa Tengah. Dilihat dari segi penggunaan terhadap tanah di Kabupaten Semarang dari gambar tabel diatas 33 % berfungsi sebagai tegal/kebun, 26 % sawah, 15,92 % hutan/kebun dimana secara geografis terletak dipedesaan dan pemiliknya adalah sebagian besar adalah para petani yang memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah,

dan pengetahuan yang beraneka ragam, bahkan wajib pajak tersebut atas pemilik tegal/kebun, sawah yang tidak bisa baca tulis, tetapi mempunyai ketaatan yang cukup tinggi untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi kewajiban mereka. Meskipun secara teoritis faktor internal (termasuk faktor pendidikan) mempengaruhi ketaatan wajib pajak, tetapi dalam penelitian pengaruh pendidikan terhadap ketaatan wajib pajak tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut terbukti dari banyaknya wajib pajak yang tidak taat di kelurahan perkotaan (Ungaran) yang wajib pajaknya rata-rata mempunyai pendidikan formal cukup tinggi (Sarjana), dengan tingkat ketidaktaatan berkisar 20 % dari seluruh wajib pajak PBB. Sementara untuk Kelurahan Gedanganak yang merupakan daerah pengembangan justru wajib pajak PBB yang tidak taat relatif sedikit (kurang dari 20 %)

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan jawaban responden terdapat 92,85 % wajib pajak yang mengaku taat membayar PBB, sehingga hanya 7,15 % wajib pajak yang tidak taat membayar PBB (Lihat Tabel III.2). Tapi dari hasil perhitungan data antara target PBB dengan realisasi di 3 (tiga) kelurahan sampel diketahui wajib pajak yang tidak taat membayar PBB rata-rata 23,16 %. Dengan demikian dapat disimpulkan penarikan PBB di Kabupaten Semarang belum optimal.

Dan tingkat ketaatan wajib pajak PBB di Kabupaten Semarang baru sebatas pada tingkat taat/patuh saja, belum sampai pada taraf sadar. Jadi pada diri wajib pajak belum ada kesadaran : mengapa wajib membayar PBB, apa manfaat PBB, bagaimana cara menghitung jumlah pajak terutang, dan lain sebagainya. Sehingga wajib pajak tidak tahu hak dan kewajiban sebagai wajib pajak PBB.

2. Kendala yang dialami wajib pajak PBB untuk memenuhi kewajiban pajaknya, seringkali dikarenakan menurunnya kemampuan ekonomi wajib pajak baik yang disebabkan oleh pengaruh krisis maupun pengaruh-pengaruh lain. Permohonan pengurangan pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan di Kabupaten Semarang hanya berkisar 10 % - 15 % saja. Dan hal ini dikarenakan wajib pajak merasa bahwa pengenaan pajak tidak berdasarkan rasa keadilan, karena wajib pajak tidak dilibatkan dalam perhitungan hutang pajaknya. Sedang kendala dari sudut petugas/pemerintah, masih kurang aktif dalam melakukan pendekatan kepada wajib pajak PBB. Data wajib pajak maupun obyek pajak yang dihimpun oleh petugas juga kurang akurat. Usaha-usaha yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Semarang untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak PBB adalah melakukan pendekatan persuasi dengan wajib pajak ditingkat desa dan kelurahan. Bentuk sosialisasi melibatkan tokoh-tokoh masyarakat RT dan RW sehingga menimbulkan image masyarakat berbicara dengan kalangan sendiri untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

3. Reformasi perpajakan dibidang PBB ternyata belum mampu meningkatkan ketaatan wajib pajak PBB, hal tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan aparat tentang hak dan kewajiban wajib pajak PBB, maupun sosialisasi dalam PBB sistem *self assessment*.

4.2 Saran

Dari hasil penelitian, maka dapat dikemukakan saran sehubungan dengan ketaatan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Semarang sebagai berikut :

1. Perlu adanya pembinaan ketaatan wajib Pajak Bumi dan Bangunan ditiap kelurahan. Kalau perlu dibentuk semacam paguyuban wajib Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sarana komunikasi antar wajib pajak. Dalam komunikasi ini dapat dikemukakan berbagai usul terutama pelaksanaan asas menghitung sendiri (*self assessment*) sehingga tidak ada wajib pajak yang merasa dirugikan. Penentuan suatu nilai (obyek pajak) terutama bumi/tanah, pemerintah diharapkan dapat menentukan suatu nilai yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan formal yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Apabila didalam praktek terdapat transaksi yang jauh lebih rendah dari nilai dasar yang ditetapkan dengan tujuan menghindari pajak, maka pemerintah dapat mengambil alih transaksi tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh para pihak yang terkait. Tetapi apabila terjadi transaksi diatas nilai dasar, maka kelebihan transaksi tersebut dapat dikenakan pajak tertentu.
2. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Semarang bersifat fleksibel terhadap setiap permohonan pengurangan hutang pajak yang diajukan oleh wajib pajak. Pemerintah Kabupaten dapat melakukan investigasi untuk memperoleh kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan hutang pajak. Jika diketemukan alasan pembenar, maka Pemerintah Kabupaten dapat memberikan kebijakan kepada wajib pajak. Bagi wajib pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan terlambat dan/atau melebihi jatuh tempo pembayaran

sebagaimana tercantum dalam SPPT hendaknya Pemerintah Kabupaten mengambil *policy* berorientasi pada kemampuan wajib pajak. Dalam hal ini dapat dilakukan sebagaimana saran diatas atau metode lain yang lebih bijaksana sebab ada karakter yang berbeda antara wajib pajak yang mengajukan permohonan dengan wajib pajak yang terlambat membayar. Penentuan NJOP dapat diserahkan kepada wajib pajak sesuai dengan mekanisme pasar, dengan konsekuensi apabila dibawah nilai dasar pemerintah dapat memberikan berbagai kebijakan, tetapi apabila diatas nilai dasar kebanyakan dapat dikenai pajak tertentu. Pelaksanaan perhitungan hutang pajak atas obyek pajak yang bernilai tinggi, NJOP-nya dapat ditentukan oleh wajib pajak sendiri, sementara pajak lainnya ditentukan oleh pemerintah.

3. Apapun usaha yang telah dilakukan oleh aparatur Pemerintah Kabupaten Semarang khususnya yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan hendaknya dilakukan pengawasan yang ketat. Diperlukan adanya pembinaan karir kearah profesional sehingga mampu menempatkan permasalahan secara proporsional. Diperlukan sumber daya manusia yang cukup memadai guna memperoleh hasil yang optimal dari Pajak Bumi dan Bangunan. Perlu adanya peraturan yang tegas, jelas, berkepastian hukum yang mengatur tentang para pejabat yang dalam jabatannya berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan obyek pajak. Perlu adanya sanksi yang tegas bagi pejabat yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik

dan/atau melakukan tindak penyelewengan jabatan yang sangat merugikan negara. Ketentuan mengenai hal ini sebenarnya telah diatur dalam pasal 21 UU No. 12 Tahun 1985, hanya saja mekanisme pelaksanaannya belum sesuai dengan yang diharapkan.

4. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya yang berhubungan dengan pajak maka perlu ditekankan adanya pemahaman asas-asas hukum yang menjadi substansi dasar pengembangan ilmu hukum.
5. Supaya masyarakat lebih taat membayar pajak khususnya PBB, maka pelayanan umum maupun fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan. Hal ini dapat menjadikan presedent baik bagi masyarakat, karena telah melakukan kewajiban pajaknya, maka hak-haknya sebagai warga negara (khususnya terpenuhinya fasilitas yang langsung dirasakan masyarakat dan pelayanan umum yang memuaskan dibutuhkan masyarakat) telah diberikan oleh Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Agustini, Tika Noorjaya Asikin dan Himawati, Yulia, Pajak, Citra dan Bebannya, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1990
- Anwar, H. Yozar, Strategi Perpajakan Mendukung Pembangunan, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1990
- A.T. Salamun, Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Pemerintah dan Peran Akuntan Dalam Penerimaan Pajak, Naskah Disampaikan Pada Dies Natalis XII STAN, 22 Agustus 1988
- Ali, Chaidir, Hukum Pajak Elementer, PT. Eresco, Bandung, 1993
- Arikunti Suharsini, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- Arinta AK, Kustadi dan Zaini, AK, Moh, Pembaharuan Perpajakan Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Bawasir, Fuad, Pokok-Pokok Perubahan UU Perpajakan Serta Kesiapan Fiscus Dalam Menyambut Perubahan UU Perpajakan, Seminar Reformasi Perpajakan II, Yogyakarta, 1994
- Bohari, Pengantar Hukum Pajak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Brotodihardjo, Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT. Revika Adhitama, Bandung, 1998
- Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Universitas Diponegoro, Metode Penelitian Ilmu Sosial Dengan Orientasi Pada Penelitian Bidang Khusus, Semarang, 1999
- Black, Henry Campbell, et. al. Black's Law Dictionary (Sixt Edition), West Publishing Co., St Paul, Minnesota, USA, 1990
- Brannam, Yulia, Mixing Methods, Qualitative and Quantitative Research, Avenbury, Brookfield, USA, 1992

- Budiyono, Tri, *Sistem Pemungutan PBB* (studi kasus di desa Badran, Kec. Susukan, Kab. Semarang pada Th. 1993 – 1994)
- Danim, Sudarwan, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000
- Dep. Keuangan RI, Dirjen Pajak, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Jakarta, 1992
- Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asah Asih Asuh, Malang, 1990
- Gunadi, Sartan, *Latarbelakang Perpajakan*, tanpa penerbit, 1995
- _____, *Berita Pajak*, Jakarta, 1997
- Hartono, CFG Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991
- Hartono, CFG Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994
- Himpunan Peraturan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*
(tanpa tahun) Beserta Perubahannya Tertanggal 28 Januari 1998
- Hamzah, Andi, *UU Baru Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Serta Bea Materai*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Hajhon, M Pilipus, *Himpunan Perubahan UU Perpajakan*, Cetakan I, CV. Eko Jaya, Jakarta, 1994
- _____, *Peradilan Pajak di Indonesia Dewasa Ini*, Makalah Seminar Nasional Penegakan Hukum Pajak dan Keadilan Pembagian Beban Pajak, Fakultas Hukum UNDIP, 25 September 1995
- Ilyas Wirawan B. dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2001
- Irianto, Agus, et. al. *UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Catatan dan Latar Belakang*, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1994
- Ichsan, HM, *Administrasi Perpajakan*, Universitas Terbuka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1986

- Judisseno, K Rimzky, Perpajakan dan Strategi Bisnis, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 1996
- _____, Perpajakan, Edisi Revisi, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 1999
- Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Kusumah, Mulyana W, Peranan dan Pendayagunaan Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 1982
- Kuneng, Mulyadi, Himpunan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PT. Setio Acsees, Jakarta, 1996
- Keraf, Gorys, Eksposisi dan Diskripsi, Nusa Indah, Flores, 1982
- _____, Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa, Nusa Indah, Flores, 1993
- _____, Eksposisi Komposisi, Gramedia Widiaswara Indonesia, Jakarta, 1995
- Kartasapoetra, G, et al. Sistem dan Pelaksanaan Perpajakan di Indonesia, Makalah Seminar Nasional Perpajakan Dalam Rangka Dies Natalis UNDIP Semarang XLI, Diselenggarakan Oleh Fakultas Ekonomi UNDIP Semarang, 18 Oktober, 1987
- _____, Pajak Bumi dan Bangunan, Prosedur dan Pelaksanaannya, Bina Aksara, Jakarta, 1989
- Miyasto, Pajak Bumi dan Bangunan Dilihat Dari Fungsinya Dalam Konteks Keadilan dan Pembiayaan Pembangunan, Center For Fiscal and Monetary Studies, Jakarta, 1993
- _____, Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Ekonomi, Pada Fakultas Ekonomi, UNDIP Semarang, 1997
- _____, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Makalah Pelatihan Pada Diklat Bidang Pendapatan Tipe C, Diklat Propinsi Tk. I Jawa Tengah, 28 Februari, 1998.

- Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994
- Muhadjir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Raka Sarasin, Yogyakarta, 1996
- Munawir, et al. Perpajakan, BPFE, Yogyakarta, 1990
- _____, Perpajakan, Liberty, Yogyakarta, 1992
- Mukodim, Perpajakan, Edisi I, UII Press dan Ekonesia, Yogyakarta, 1993
- _____, Perpajakan, Buku I Edisi Kedua/Revisi, UII Press dan Ekonesia, Yogyakarta, 1999
- Musgrave, Richard A and Musgrave, Peggy B, Keuangan Negara, Dalam Teori dan Praktek, Erlangga, Jakarta, 1991
- Mangkoesubroto, Guritno, Kebijaksanaan Ekonomi Publik, BPFE, Yogyakarta, 1993
- Miles, Matthew, Analisa Data Kualitatif, Penerjemah Tjetjep Rohindi Roahadi, UI Press, Jakarta, 1992
- Moeliyono, Anton M, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan II, Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1991
- Nyatriyani, Rinitami, Aspek Keadilan Dalam Perpajakan Pada Pajak Bumi dan Bangunan, tanpa penerbit, 1993
- Nazir Moh., Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Nasution, S., Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Transito, Bandung, 1996
- Nasution, S. dan M Thomas, Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah, Bina Aksara, Jakarta, 1996
- Nordholt, Nico Schulte : Ojo Dumeh, Kepemimpinan Lokal Dalam Pembangunan, Sinar Harapan, Jakarta, 1987
- Pilippe, Nonet and Pilippe, Zelnic, Law and Society in Transition, Harper Colopone Book, New York, 1976

- Polama, M. Margaret, Sosiologi Kontemporer (Cetakan IV), Alih Bahasa oleh Tim Penterjemah Ysogama, Rajawali Press, Jakarta, 2000
- Rahardjo, Satjipto, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1980
- Sastropoetro, Santoso, Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional, Alumni, Bandung, 1988
- Sunggono, Bambang, Hukum dan Kebijakan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Sudarsono, Aturan Bea Materai dan Kebijakan Pajak, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung, 1992
- Soemitro, Rochmat, Azas dan Dasar Perpajakan II, Eresco, Bandung, 1987
- _____, Pajak Bumi dan Bangunan, Eresco, Bandung, 1989
- _____, Azas dan Dasar Perpajakan I, Eresco, Bandung, 1990
- _____, Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum, Eresco, Bandung, 1991
- _____, Azas dan Dasar Perpajakan III, Eresco, Bandung, 1991
- Sumarjono, SW, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, tanpa penerbit, Yogyakarta, 1984
- Sidik, Mahfudz, UU Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Bagian Dari Reformasi Perpajakan, tanpa penerbit, Jakarta, 1997
- Singarimbun, Masri, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta, 1995
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1994
- Soekanto, Soerjono, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, IND-HU-CO, Jakarta, 1990
- Soekanto, Soerjono, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982

- _____, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Soemitro, Ronny Hanityo, Masalah-Masalah Sosiologi Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983
- _____, Permasalahan Hukum Didalam Masyarakat (Edisi II), Alumni, Bandung, 1984
- _____, Studi Hukum dan Masyarakat (Edisi II), Alumni, Bandung, 1985
- _____, Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1985
- _____, Studi Hukum dan Kemiskinan, Penerbit Tugu Muda, Semarang, 1989
- _____, Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum, Agung Press, Semarang, 1989
- _____, Studi Hukum Masyarakat dan Teknologi, Agung Press, Semarang, 1989
- _____, Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik Didalam Masyarakat, Agung Press, Semarang, 1990
- _____, Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Didalam Masyarakat, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang 6 Desember 1990
- _____, Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris, dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 9 Th. 1991, Hal. 44-50
- _____, Peran Metodologi Penelitian Hukum Dalam Pengembangan Ilmu Hukum, dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 5 Th. 1992, Hal. 32-40
- _____, Hubungan Antara Kesadaran Hukum Dengan Tingkat Pendidikan (Penelitian Mengenai Korelasi Antara Kesadaran Membayar Pajak Dengan Tingkat Pendidikan) dalam Majalah Masalah Hukum No. 6 Th. 1993, Hal. 35-44

- _____, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Edisi V), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- _____, Penggunaan Analisis Kausal Dalam Penelitian Hukum Yang Sosiologis, dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 11 Th. 1994 Hal. 35-40
- _____, Politik Kekuasaan dan Hukum (Pendekatan Manajemen Hukum), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 1998
- Stewart, David M, Secondary Research, Information Sources and Methods, Sage Publications, Newbury Park, London, 1984
- Trijono Onny S. dan Pranarka, A.M. W., Konsep Pemberdayaan, Kebijakan dan Implementasi, CSIS, Jakarta, tanpa tahun
- Wahab, Solichin Abdul, Analisis Kebijakan, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Walgito, Bimo, Psikologis Pendidikan, Kanisius, Yogyakarta, 1999, Hal. 16
- Warsito, Praktikno, Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Implementasi, Rajawali, Jakarta, 1992
- Winardi, Pengantar Metodologi Research, Alumni, Bandung, 1982
- _____, Alih Bahasa Nukta Arfawie, et al., Pemandu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari, Samarinda, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- UU RI No. 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua UU No. 6 tahun 1983
- UU RI No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- UU RI No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- UU RI No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- UU RI No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

- UU RI No. 9 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Perubahan Atas UU No. 6 tahun 1983
- UU RI No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perubahan Atas UU No. 12 tahun 1985
- Peraturan Pemerintah RI No. 47 tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Kep. Menkeu RI No. 1002/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Pendaftaran Obyek Pajak Bumi dan Bangunan
- Kep. Menkeu RI No. 1003/KMK.04/1985 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Kep. Menkeu RI No. 1004/KMK.04/1985 tentang Penentuan Badan atau Perwakilan Organisasi Internasional Yang Menggunakan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dikenakan PBB
- Kep. Menkeu RI No. 1006/KMK.04/1985 tentang Tatacara Penagihan PBB dan Penunjukkan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Kuasa
- Kep. Menkeu RI No. 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan PBB kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II
- Kep. Menkeu RI No. 1009/KMK.04/1985 tentang Pelaksanaan Bagi Hasil PBB
- Kep. Menkeu RI No. 19/KMK.04/1986 tentang Tatacara Penagihan Pendaftaran Objek Pajak dari PBB
- Kep. Ber. Menkeu dan Mendagri RI No. 1089 a/KMK.04/1988 dan No. 973 tentang Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Jenis Objek Pedesaan dan Perkotaan Tiap Daerah Tingkat II tahun 1988/1989
- Kep Mendagri RI No. 10 tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya Serta Pemungutan PBB di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
- Kep. Menkeu RI No. 1324/KMK.04/1988 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan PBB

- Kep. Menkeu RI No.617/KMK.04/1989 tentang Pendapatan Objek dan Subjek PBB
- Kep. Menkeu RI No. 817/KMK.04/1991 tentang Tatacara Pendaftaran dan Pendataan Objek dan Subjek PBB
- Kep. Menkeu RI No. 1147/KMK.04/1991 tentang Klasifikasi dan Besarnya NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB
- Kep. Menkeu RI No. 174/KMK.04/1993 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB
- Kep. Menkeu RI No. 196/KMK.04/1994 tentang Perubahan Atas lampiran III (tiga), IV (empat), V (lima), VI (enam), Kep. Menkeu RI No. 174/KMK.04/1993 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB
- Kep. Menkeu RI No. 273/KMK.04/1995 tentang Perubahan Atas lampiran III (tiga), IV (empat), V (lima), VI (enam), Kep. Menkeu RI No. 174/KMK.04/1993 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Kep. Menkeu No. 196/KMK.04/1994
- Kep. Menkeu RI No. 83/KMK/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
- PP RI No. 12 tahun 1994 tentang Penetapan Besarnya Prosentase NJKP pada PBB
- Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No. SE-38/PJ.6/1993 tanggal 30 Juni 1993 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan PBB
- Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No. SE-28/PJ.6/1992 tentang Petunjuk Teknis Nomor Objek Pajak (NJOP) PBB
- Kep. Dirjen Pajak No. 04/PJ.6/1998 tanggal 16 Juni 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek PBB Dalam Rangka Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)